



**PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA**  
**BAGIAN ADM. PEREKONOMIAN DAN**  
**SUMBER DAYA ALAM**

**RENCANA STRATEGIS**



Jl. Soekarno Hatta No.01 Pematang Aur 38576 Telp. (0736) 91234,

## KATAPENGANTAR

Puji syukur Kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenan-Nya, maka Rencana Strategis Bagian Administrasi Perekonomi dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2016 – 2021 dapat diselesaikan.

Bagian Administrasi Perekonomi dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma merupakan salah satu OPD yang mempunyai kebijakan strategis dalam perumusan kebijakan terkait peran serta masyarakat dalam pemanfaatan potensi perekonomian dan sumber daya alam yang berkelanjutan yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma tahun 2016 – 2021, sesuai yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 jo. Peraturan Bupati Seluma Nomor 14 Tahun 2010 jo. Peraturan Bupati Seluma Nomor 04 tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma.

Menyadari dengan keterbatasan yang ada, sangat dimungkinkan dokumen rencana strategis yang telah kami susun ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu dibutuhkan koreksi dan perbaikan, serta saran dari berbagai pihak guna penyempurnaan lebih lanjut.

Akhirnya, dengan memanjatkan Ridho kepada Tuhan Yang Maha Esa semoga dokumen rencana strategis ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan roda pemerintahan terutama di bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam agar dapat terwujud reformasi Birokrasi yang kapabilitas dan akuntabel.

Tais, Februari 2019

Kabag Adm. Perekonomian dan SDA,



**ZURAINI, SP. M.Si**

NIP. 19730301 2006042002

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	2
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>3</b>
<b>Bab I</b> <b>Pendahuluan</b> .....	<b>5</b>
1.1   LatarBelakang .....	5
1.2   Landasan Hukum.....	5
1.3   Maksud Dan Tujuan .....	9
1.4   Sistematika Penulisan.....	9
<b>Bab II</b> <b>Gambaran Pelayanan Bagian Administrasi Perekonomian Dan</b>	
<b>Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma</b> .....	<b>10</b>
2.1   Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Bagian Administrasi	
Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	
Kabupaten Seluma.....	10
2.1.1 Struktur Organisasi.....	10
2.1.2 Tugas dan fungsi.....	11
2.1.3 Pegawai dan Aset Bagian Perekonomian Dan SDA OPD... ..	18
2.1.3.1 Pegawai.....	18
<b>Bab III</b> <b>Isu-isu strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi</b> .....	<b>22</b>
3.1   Telaah Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah dan Wakil	
Kepala Daerah.....	23
A. Misi Pembangunan .....	23
B. Penjelasan Visi dan Misi .....	23
C. Aspek Tri Sakti.....	23
D. Aspek Tiga Dimensi Pembangunan .....	25
E. Prioritas Nawacita.....	26
3.2   Telaah Renstra K/LDan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota.....	36
3.2.1 Kementerian Pertanian.....	37
3.2.2 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.....	44
3.2.3 Kementerian ESDM.....	46
3.2.4 Kementerian Pariwisata.....	48
3.3   Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan	
Hidup Strategi.....	51
3.4   Penentuan Isu-Isu Strategis.....	53

Bab IV	Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Strategis Bagian Administrasi Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma.....	54
	4.1 Visi dan Misi OPD.....	54
	4.2 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah OPD.....	55
	4.2.1 Tujuan Jangka Menengah OPD.....	55
	4.2.2 Sasaran.....	55
	4.2.3 Strategi Dan Kebijakan.....	56
Bab V	Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif.....	57
Bab VI	Indikator Kinerja OPD Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD.....	58

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Seluma Nomor 04 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma. Pada pasal 29, Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam melaksanakan tugas Sekretariat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan administratif di bidang perekonomian, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan penanaman modal serta badan usaha daerah, pertanian, kehutanan, pertambangan dan energi sumber daya mineral serta lingkungan hidup.

Pada hakekatnya pembangunan berkelanjutan merupakan aktifitas memanfaatkan seluruh sumber daya, guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan pada dasarnya merupakan upaya memelihara keseimbangan antara lingkungan alami (sumber daya alam hayati dan non hayati) dan lingkungan binaan (sumber daya manusia dan buatan), sehingga sifat interaksi maupun interdependensi antar keduanya tetap dalam keserasian yang seimbang. Pembagian sumber daya alam menjadi sumber daya alam terbarui dan tidak terbarui memberi pengertian tentang fungsi keterlanjutan persediaan sumber daya tersebut bagi kehidupan di alam semesta. Sumber daya alam hayati akan tetap mampu memperbarui diri, sepanjang eksploitasinya tidak melampaui laju kembang biaknya, sedangkan sumber daya alam tak terbarui seperti galian tambang, gas bumi, batu bara dsb, kondisi jumlahnya dialam relative terbatas, oleh karena itu akan terurai di alam bila daya gunanya telah habis. Kategori sumber daya alam telah berkembang dengan penggolongan sumber daya alam tak terhabiskan dan sumber daya alam terdaur ulang. Sumber daya alam yang tak terhabiskan adalah sinar surya, curah hujan, energi pasang surut.

Ombak/gelombang arus (OTEC) sedangkan sumber daya alam terdaur ulang terkait dengan kemampuan teknologi untuk daur ulang menjadi komponen alami kembali, agar pemborosan dan penggunaan sumber daya alam yang berlebihan dapat dikendalikan tidak mengarah pada kelangkaan dan kepunahan.

Kondisi sumber daya alam merupakan modal dasar dan penentu keterlanjutan kemampuan daya dukung lingkungan. Lingkungan pada dasarnya mengandung matra biogeofisik kimia sosial ekonomi, sosial budaya dan kesehatan. Dalam kaitan kuantitas dan kualitas sumber daya alam untuk mendukung kehidupan, maka hubungan keselarasan dengan jenis-jenis kegiatan manusia harus terus dipelihara kelestarian kemampuan daya dukung lingkungannya. Bidang pengembangan sumber daya pertanian, perkebunan, kehutanan, ketahanan pangan, perikanan, kelautan, peternakan, energi dan sumber daya mineral serta lingkungan hidup, telaah tentang sumber daya didasarkan pada upaya pemanfaatan untuk kehidupan. Cara mengungkapkan data dan informasi sumber daya tersebut disajikan dalam format hasil inventarisasi, potensi dan kondisi yang ada.

Salah satunya dengan menyusun Rencana Strategis Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, dengan dukungan data dasar pembangunan wilayah provinsi secara tepat dan akurat, agar dapat dipakai sebagai acuan maupun referensi valid untuk berbagai perencanaan bagian/sektor terkait. Dengan demikian keterkaitan kualitas dan kuantitas berbagai sumber daya pada pemanfaatan sumber daya alam dan potensi sumber daya dibutuhkan untuk pengambilan keputusan dan perencanaan program termasuk untuk digunakan sebagai dasar pembinaan dan pemantauannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka pertimbangan untuk keserasian ekologi, ekonomi sumber dan sosial wajib digunakan dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seluma, untuk dapat diuraikan lebih lanjut dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah (RPJM-OPD) atau Renstra OPD untuk periode Lima Tahun.

Dalam implementasinya prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan (PB) juga harus termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (RPTD) maupun Rencana Kerja (Renja) OPD, baik di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Prinsip-prinsip utama dalam pembangunan berkelanjutan antara lain sifat interaksi-interdependensi, asas faktor pembatas dan toleransi, asas daya dukung dan keseimbangan ekosistem, asas holocoenitik, teknologi ramah lingkungan, etika lingkungan dan kesadaran atau kepedulian lingkungan, yang wajib dipertimbangkan dengan seksama dalam penyusunan dokumen Renstra ini.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Renstra Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Seluma disusun berdasarkan :

1. Landasan Iddiil yaitu Pancasila
2. Landasan Konstitusional yaitu Undang-undang Dasar RI Tahun 1945;

Landasan Operasional :

- 1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
- 2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneaia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Permenpan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Renstra Bagian Administarsi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kabupaten Seluma Tahun 2016-2021 adalah:

1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Bagian Administarsi Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama periode tahun 2016-2021;
2. Menetapkan program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Administarsi Perekonomian dan Sumber Daya Alam tahun 2016-2021.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Bagian Administarsi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kabupaten Seluma Tahun 2016-2021 adalah:

1. Menjadi pedoman dan acuan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran yang berkualitas dan terukur dalam mencapai target RPJMD tahun 2016-2021;
2. Mengoptimalkan peranan Bagian Administarsi Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam pencapaian visi dan misi Kabupaten Seluma 2016 – 2021 yang dijabarkan didalam RPJMD.
3. Sebagai dasar penyusunan Renja Bagian Administarsi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kabupaten Seluma;
4. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Bagian Administarsi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kabupaten Seluma baik tahunan maupun 5 (lima) tahunan;
5. Memberikan hasil akhir dan pencapaian program-program yang berkualitas dan saling sinergis; dan
6. Mewujudkan hasil control pelaksanaan program dan kegiatan guna mendukung program dan kegiatan prioritas.

## **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PELAYANAN BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN  
SUMBER DAYA ALAM

BAB III ISU – ISU STRATEGIS

BAB IV VISI DAN MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,  
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN  
DAN SUMBER DAYA ALAM

BAB VII PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETRIAT DAERAH KABUPATEN SELUMA**

#### **2.1 TUGAS, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SELUMA**

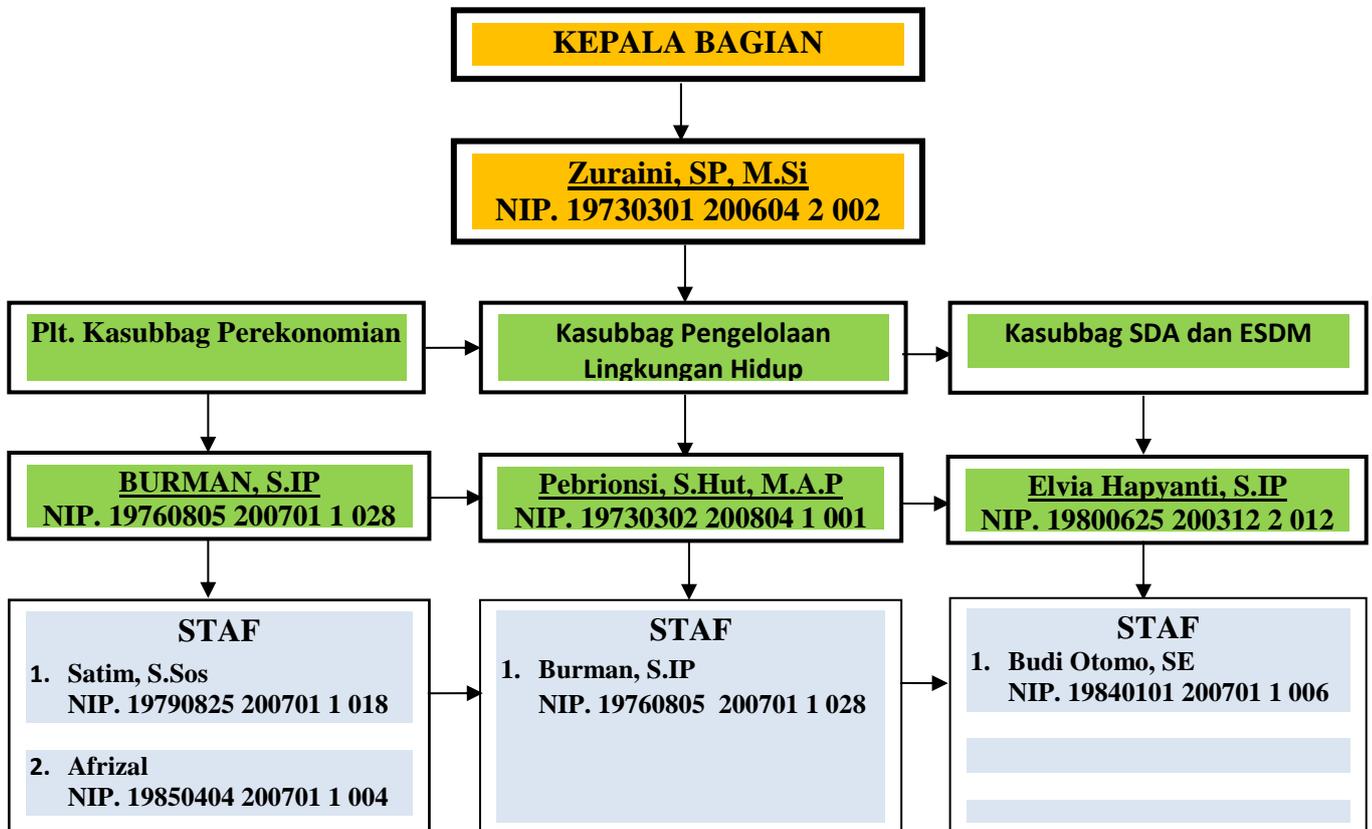
##### **2.1.1 Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Seluma Nomor 04 Tahun 2017 tentang tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma pada pasal 2 Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam terdiri dari:

1. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
2. Sub Bagian Perekonomian;
3. Sub Bagian Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Sub Bagian Sumber Daya Alam dan ESDM;

Tugas dan Fungsi Bagian maupun Sub Bagian diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2017 pada Pasal 29 sampai dengan Pasal 33. Alur garis koordinasi Bagian Administrasi Bagian Perekonomian dan SDA sebagai berikut :

**SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI**  
**Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam**  
**Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma:**



### 2.1.2 Tugas dan Fungsi

Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Seluma di bidang perekonomian dan sumber daya alam, dipimpin oleh Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya di bawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Masing-masing Bagian dipimpin oleh Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam melaksanakan tugas Sekretariat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan administratif di bidang perekonomian, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan penanaman modal serta badan usaha daerah, pertanian, kehutanan, pertambangan dan energi sumber daya mineral serta lingkungan hidup.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 29, Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program kerja bagian;
2. Mengumpulkan bahan untuk menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan serta Penanaman Modal dan BUD;
3. Melakukakan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam rangka pembinaan dibidang Koperasi dan UKM serta Perindustrian dan Perdagangan;
4. Melakukakan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam rangka proses pelaksanaan penanaman modal di daerah dan menumbuh kembangkan BUD;
5. Melakukan pemantauan dan analisis data sektor Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan serta Penanaman Modal dan BUD
6. Merumuskan bahan kebijakan di bidang Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan serta Penanaman Modal dan BUD;
7. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis perencanaan dan penggalian potensi di bidang sumber daya alam, energi panas bumi dan taman hutan raya;
8. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap administrasi perencanaan dan penggalian serta konservasi sumber daya alam;
9. Merumuskan bahan kebijakan pengelolaan sumber daya alam;

10. Penyiapan perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan perekonomian dan sumber daya alam;
11. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang penanaman modal dan BUMD, koperasi, pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energy sumber daya mineral serta sarana perekonomian;
12. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam dan energy sumber daya mineral serta sarana perekonomian;
13. Melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di bagian administarsi perekonomian dan sumber daya alam; dan
14. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan Pertanian, Kehutanan, Pertambangan & Energi serta Lingkungan Hidup;
15. Memfasilitasi dan mengkoordinir serta memformulasikan usul penyusunan Renstra, Renja dan RKA, DPA, profil bagian dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dari sub bagian;
16. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
17. Memberi petunjuk, arahan dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
18. Menilai dan mencatat prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
19. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

## Sub Bagian Perekonomian

### Pasal 31

Sub Bagian Perekonomian mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Perekonomian;
2. Melaksanakan pengumpulan bahan untuk penyusunan pedoman dan petunjuk pembinaan di bidang perekonomian, perindagkop dan UKM, penanaman modal dan Badan Usaha Milik Daerah;
3. Melaksanakan penghimpunan data dan menganalisa data mengenai perekonomian di Kabupaten Seluma;
4. Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam rangka pembinaan bidang perekonomian;
5. Melakukan koordinasi dengan instansi daerah yang terkait dalam rangka kegiatan pembinaan urusan perindustrian dan perdagangan;
6. Melaksanakan penghimpunan data dan menganalisa data mengenai perindustrian dan perdagangan;
7. Mengawasi persiapan dan perkembangan pelaksanaan kegiatan perindustrian dan perdagangan guna meningkatkan perekonomian;
8. Melakukan penelaahan kelayakan sumber potensi daerah secara menyeluruh untuk kepentingan perencanaan perindustrian dan perdagangan daerah serta perencanaan penanaman modal daerah;
9. Mengawasi persiapan dan perkembangan pelaksanaan penanaman modal di daerah untuk kepentingan penilaian didalam pelaksanaan dan penyesuaian yang diperlukan daerah;
10. Melaksanakan penghimpunan data dan menganalisa data mengenai penanaman modal dan BUD;
11. Memberi tugas atau kegiatan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan sub bagian dapat berjalan baik dan tuntas;

12. Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
13. Menyiapkan bahan usul penyusunan Renstra, Renja dan RKA, profil dan LAKIP sub bagian;
14. Memberi petunjuk, arahan dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
15. Menilai dan mencatat prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan;

#### Sub Bagian Sumber Daya Alam dan ESDM

##### Pasal 32

Sub Bagian Sumber Daya Alam dan ESDM mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Sumber Daya Alam dan ESDM;
2. Melaksanakan koordinasi dan pelayanan adminstatif terhadap pengelolaan dan pengendalian dan pengawasan sumber daya alam dan energi sumber daya mineral;
3. Menyiapkan bahan-bahan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Sub Bagian Sumber Daya Alam dan Energi Sumber Daya Mineral;
4. Penyiapan bahan analisis data di sektor Sumber Daya Alam dan Energi Sumber Daya Mineral;
5. Menyusun rencana operasional, rencana kinerja dan penetapan kinerja jadi sektor Sumber Daya Alam dan Energi Sumber Daya Mineral;

6. Pelayanan administrasi bagi perangkat daerah yang melaksanakan urusan di sektor Sumber Daya Alam dan Energi Sumber Daya Mineral;
7. Menghadiri rapat teknis di sektor Sumber Daya Alam dan Energi Sumber Daya Mineral sesuai disposisi atasan;
8. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional koordinasi di sektor Sumber Daya Alam dan Energi Sumber Daya Mineral;
9. Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan di Sub Bagian Sumber Daya Alam dan ESDM;
10. Melaksanakan penghimpunan data dan analisa data potensi sumber daya alam dan ESDM dan melaksanakan pemantauan serta pengendalian sumber daya alam dan ESDM;
11. Menyediakan pedoman dan bahan referensi penyelenggaraan pengembangan sumber daya alam terbarukan dan ESDM;
12. Melakukan pendataan potensi dan pengelolaan energi panas bumi;
13. Menyiapkan bahan usul penyusunan Renstra, Renja dan RKA, profil dan LAKIPsub bagian;
14. Memberi tugas kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Sumber Daya Alam dan Energi Sumber Daya Mineral;
15. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
16. Memberi petunjuk, arahan dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
17. Menilai dan mencatat prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan;

## Sub Bagian Pengelolaan Lingkungan Hidup

### Pasal 33

Sub Bagian Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana dan program kerja sub bagian Lingkungan Hidup ;
2. Menyediakan dan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup dan kehutanan;
3. Membagi tugas dan atau kegiatan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Melaksanakan pemantauan dan pengumpulan data mengenai pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan;
5. Melaksanakan pengolahan data dan analisa data mengenai lingkungan hidup dan kehutanan;
6. Mempersiapkan bahan-bahan dan mengkoordinasikan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup kepada Dinas/Instansi terkait;
7. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan koordinasi tugas di sector lingkungan hidup dan kehutanan;
8. Melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan rumusan bahan kebijakan dalam sektor lingkungan hidup dan kehutanan/taman hutan raya;
9. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat dan antar provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka sinkronisasi program dan optimalisasi pembangunan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan;
10. Menghadiri rapat teknis di sektor lingkungan hidup dan kehutanan sesuai disposisi atasan;
11. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan sesuai dengan petunjuk kerja dan ketentuan yang berlaku agar tercapai keberhasilan;

12. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
13. Menyiapkan bahan usul penyusunan Renstra, Renja dan RKA, profil dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sub bagian;
14. Memberi petunjuk, arahan dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
15. Menilai dan mencatat prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan;

### 2.1.3 PEGAWAI DAN ASET BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM OPD

#### 2.1.3.1 Sumber Daya Manusia Aparatur

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bagian Adm. Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kabupaten Seluma didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur sebanyak 11 orang, yang terdiri dari 8 orang PNS dan 3 orang Pegawai Harian Lepas. Dengan demikian SDM yang dimiliki oleh Bagian Organisasi dan Kepegawaian seluruhnya berjumlah 11 orang seperti terlihat pada tabel di bawah :

**Tabel 2.2**

#### **Sumber Daya Manusia Bagian Adm. Perekonomian dan Sumber Daya Alam**

No	Pegawai	Jenis Kelamin			Total		
		L	%	P	%	Σ	%
1	PNS	5	62,5	3	37,5	8	100
2	PHL	1	33,33	2	66,66	3	99,99
	Total	6	54,54	5	45,45	11	99,99

Untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai kondisi SDM Bagian Adm Perekonomian dan Sumber Daya Alam khususnya yang berstatus PNS, berikut ini distribusinya berdasarkan kategori jabatan, pangkat/golongan, tingkat pendidikan, disiplin ilmu, dan diklat penjenjangan yang pernah diikuti.

**a) Berdasarkan Pangkat dan Golongan**

No	Pangkat/Gol	Jumlah ASN
1	Golongan IV/a	1 Orang
2	Golongan III/d	1 orang
3	Golongan III/c	2 Orang
4	Golongan III/b	1 Orang
5	Golongan III/a	2 Orang
6	Golongan II/d	0 Orang
7	Golongan II/c	0 Orang
8	Golongan II/b	1 Orang
	Jumlah	8 Orang

**b) Berdasarkan Jabatan Eselon**

No	Eselon	Jumlah ASN
1	Eselon III/a	1 Orang
2	Eselon III/b	0 orang
3	Eselon IV/a	3 Orang

**c) Berdsarkan Jenjang Pendidikan**

No	Golongan	Jumlah ASN
1	Strata 2 (S2)	3 Orang
2	Strata 1 (S1)	4 orang
3	Sarmud / D3	0 Orang
4	SLTA	1 Orang

#### **d) Berdasarkan Pendidikan Pelatihan Jabatan**

<b>No</b>	<b>Tingkatan</b>	<b>Jumlah ASN</b>
1	SPAMA / PIM TK.III	1 Orang
2	SPALA/ADUMLA/PIM TK.IV	1 Orang

#### **e) Berdasarkan Status Pegawai**

<b>No</b>	<b>Status Pegawai</b>	<b>Jumlah ASN</b>
1	PTT	3 Orang
2		0 Orang

#### **2.1.3.2 Sumber Daya Anggaran**

Jumlah dana berdasarkan DPA Bagian Adm. Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2018 sebesar Rp. 862.782.000.00,- bersumber dari dana APBD Kabupaten Seluma Tahun 2018.

#### **2.1.3.3 Sumber Daya Sarana dan Prasarana**

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Bagian Adm. Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 1. Sarana dan Prasarana Bagian Adm. Perekonomian dan Sumber Daya Alam**

NO	JENIS BARANG	JML	KONDISI			KET
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
1	Gedung Kantor	1	Baik			
2	Kendaraan roda empat	1	Baik			
3	Laptop	10	Baik			
4	Printer Canon iP 287	2	Baik			
5	Printer Canon iP 2770	3	Baik			
6	AC Sharp/Panasonic	3	Baik			
7	Meja ½ Biro	10	Baik			
8	Lemari Kayu	5	Baik			
9	Kursi Citos	9	Baik			
10	Kursi Tamu	1	Set			
11	Berangkas	2			RUSAK BERAT	
12	Kursi Tamu Panjang	1	Baik			
13	Meja Biro	6	Baik			
14	Gorden	10	Baik			
15	Kulkas	1	Baik			
16	Dispenser	2	Baik			
17	Kursi Kerja pejabat Eselon 3	1	Baik			
18	Kursi Kerja pejabat Eselon 4	2	Baik			

## **BAB III**

### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN OPD**

Isu –isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang (Permendagri 54 Tahun 2010).

Identifikasi permasalahan-permasalahan yang mempengaruhi terhadap pelayanan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma dalam rangka pembangunan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Seluma dalam 5 (Lima) Tahun ke depan.

Pelayanan di Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma masih manual, belum didukung dengan teknologi informasi, budaya dan etos kerja aparatur pemerintah yang masih rendah, standar pelayanan yang masih rendah, dan distorsi orientasi program dan kegiatan. Adapun identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Indetifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi**

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi	Standar yang digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan
			Internal	Eksternal	
Menghimpun data potensi sumber daya alam di Bidang Pertanian dan Perkebunan	Terdapatnya beberapa usah dibidang pengelolaan pertanian dan Perkebunan seperti adanya perusahaan pengelola Kelapa Sawit, Karet dan perusahaan rumah tangga pengeloa hasil pertanian dan Perkebunan	Terdapatnya data pengelola hasil pertanian dan Perkebunan	Kurangnya informasi yang di terima dan minimnya data pengelola hasil pertanian dan Perkebunan	Kerjasama antar OPD yang belum saling mendukung serta kurangnya informasi yang disampaikan oleh pengguna atau pengelola hasil pertanian dan Perkebunan	Tidak adanya Kesesuaian data informasi yang diterima
Melaksanakan pemantauan dan pengendalian sumber daya alam di Bidang Pertanian dan Perkebunan	Terdapatnya beberapa usaha dibidang pengelolaan pertanian dan Perkebunan seperti adanya perusahaan pengelola Kelapa Sawit, Karet dan perusahaan rumah tangga pengelola hasil pertaniandan Perkebunan	Adnya pemantauan langsung terhadap pengelola hasil pertanian dan Perkebunan	Kurangnya pendanaan dan keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan	Kurangnya koordinasi yang dilakukan serta Penyesuaian waktu pelaksanaan kegiatan	Data pendukung dalam proses pemantauan yang tidak sinkronisasi
Melaksanakan pengembangan sumber daya alam terbaru	Terdapatnya perusahaan rumah tangga dalam pengelolaan hasil pertanian	Sosialisai terhadap pengelola hasil pertanian yang berdampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat	Kurangnya pendanaan	Potensi sumber daya bidang pertanian yang kurang mendukung.	Kurangnya minat dari masyarakat pengelola hasil pertanian dan kuranya dukungan dari pihak-pihak terkait

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi	Standar yang digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan
			Internal	Eksternal	
Melaksanakan pengelolaan dan pengendalian dan pengawasan di Bagian Administrasi Sumber Daya Alam	Adanya perusahaan penghasil dari sumber daya alam	Tertibnya administrasi serta adanya pengawasan langsung dari penghasil sumber daya alam	Kurangnya pendanaan serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung	Kurangnya informasi serta data yang diperoleh dari penghasil sumberdaya alam dan kurangnya kerjasama antar OPD terkait	Tidak terdapatnya tenaga pelaksana teknis
Melaksanakan pemantauan dan pengelolaan data mengenai Sumber Daya Alam	Adanya kesadaran masyarakat dan perusahaan penghasil sumber daya alam dan Terdapatnya data potensi sumber daya alam	Adanya kesadaran masyarakat dan perusahaan dalam melestarikan lingkungan serta adanya data potensi sumber daya alam yang digunakan dan terbarukan	Kurangnya informasi yang diterima serta minimnya pendanaan	Kerjasama antar OPD yang belum saling mendukung serta kurangnya informasi yang disampaikan oleh pengguna atau pengelola hasil sumber daya alam	Data yang diperoleh tidak akurat
Melaksanakan survei dan pengembangan Sumber Daya Alam untuk mendukung pengembangan wilayah	Adanya peningkatan potensi Pendapatan bagi daerah	Adanya data peningkatan potensi PAD	Kurangnya data pendukung terhadap potensi sumber daya alam	Kurangnya kerjasama antar OPD	Terdapatnya potensi PAD yang belum tersentuh yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
Mempersiapkan bahan-bahan dan mengkoordinasikan Pelestarian Lingkungan Hidup kepada Dinas-Dinas terkait	Banyak terdapat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh masyarakat dan perusahaan	Adanya data kerusakan lingkungan	Minimnya informasi yang didapat	Kurangnya kesadaran masyarakat dan perusahaan dalam pelestarian lingkungan	Kerusakan lingkungan yang berdampak kepada kelestarian alam.
Melaksanakan Pemantauan dan Pengendalian Limbah, Kualitas, Air dan Udara	Adanya perusahaan penghasil sumber polusi air dan udara	Adanya kesadaran perusahaan dalam melestarikan lingkungan	Kurangnya informasi yang diterima serta minimnya pendanaan	Kerjasama antar OPD dan perusahaan yang belum maksimal serta kurangnya informasi yang disampaikan oleh pihak perusahaan	Data yang diperoleh tidak akurat

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi	Standar yang digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan
			Internal	Eksternal	
Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi objek wisata serta Pembinaan dan Pengawasan usaha pertambangan	Adanya objek wisata dan Perusahaan Pertambangan	Adanya kesadaran Masyarakat dalam mengelola objek wisata serta perusahaan pertambangan dalam melestarikan lingkungan	Kurangnya informasi yang diterima serta minimnya pendanaan	Kerjasama antar OPD, masyarakat dan perusahaan yang belum maksimal serta kurangnya informasi yang disampaikan oleh pihak perusahaan	Data yang diperoleh tidak akurat
Melakukan pengawasan secara berkala memeriksa barang-barang sembilan bahan pokok untuk dikaji layak kesehatannya	Terpenuhi bahan makanan yang layak konsumsi	Pemeriksaan laboratorium bersama BPOM	Kurangnya kesadaran pedagang dalam menjaga barangnya supaya tetap aman dan layak konsumsi	Kerjasama dengan dinas terkait tentang kelayakan pangan	Masih banyaknya ditemukannya barang atau sembilan bahan pokok kadar luarsa dan tidak layak konsumsi
Melakukan penguatan aspek lembaga dalam tim pengendalian inflasi daerah serta terus melakukan koordinasi dalam penyusunan rekomendasi kebijakan stabilitas harga pangan	Target 2018 Inflasi 3,5 + 1 % Inflasi secara nasional	Laporan pengembangan harga sembilan bahan pokok harian dan pengembangan harga bangunan	Kabupaten seluma belum bisa melakukan inflasi secara mandiri	Kerjasama dengan OPD terkait untuk saling berkoordinasi menjaga stabilitas pangan	Penghitungan inflasi hanya di Kota Bengkulu
Menghimpun para pengrajin tenun yang ada di wilayah Kabupaten Seluma	Berkembang lebih luas dan dapat terjangkau oleh masyarakat dan kedepannya bisa menjadi kampung tenun	Mendatangkan ahli tenun dari luar untuk memberikan pelatihan supaya lebih bervariasi dan inovatif	Kurangnya minat pembeli dan belum adanya pasar	Masih minimnya pendanaan, sarana dan prasarana	Belum terjangkaunya daya beli masyarakat karena masih mahal dan masih minimnya dukungan pemerintah

### 3.1 TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

#### **“*TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SELUMA YANG BERIMAN, UNGGUL DAN SEJAHTERA SERTA TERLAKSANANYA PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA YANG BERKEADILAN*”**

Di dalam rentang waktu lima tahun ke depan masyarakat Kabupaten Seluma yang terdapat perkotaan maupun perdesaan meningkat kesejahteraannya, terdidik, berdaya saing dan religius.

#### **A. Misi Pembangunan**

Misi pembangunan Kabupaten Seluma selama jangka waktu 5 (lima) tahun 2016-2021 adalah:

1. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta kerukunan umat beragama;
2. Menciptakan budaya yang menerapkan nilai-nilai agama sebagai landasan moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan dalam pembangunan daerah serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pengalaman ajaran agama;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan & memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik & bersih, efisien, efektif, profesional, transparan & akuntabel yg didukung dgn sistem pengawasan yg efektif guna menekan perilaku korupsi & kolusi;
4. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas dan aksesibilitas masyarakat dalam memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan penduduk miskin, berkualitas dan terjangkau;
5. Mendorong serta memfasilitasi tumbuh kembangnya kelembagaan masyarakat pada semua aspek kehidupan dengan memberikan perhatian utama kepada pembangunan perekonomian daerah yang memacu pertumbuhan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja;
6. Mengembangkan dan memperkuat pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang bertumbu pada pengembangan potensi local unggulan melalui sinergi sektor-sektor industri, pertanian, pariwisata, & sektor lainnya, dengan penekanan pada

- peningkatan pendapatan masyarakat;
7. Percepatan pembangunan dgn melakukan pemberdayaan desa sbg ujung tombak penyelenggaraan pembangunan yg partisipatif & demokratis sesuai kebutuhan yg didasarkan pada karakteristik & potensi sumber daya alam & sumber daya manusia;
  8. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi;
  9. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana terutama infrastruktur dasar dalam upaya menunjang pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat;

## **B. Penjelasan Visi dan Misi**

Visi Kabupaten Seluma di atas mengandung 4 (empat) kata kunci yaitu: Beriman, Unggul, Sejahtera dan Percepatan Pembangunan Desa. Adapun makna dari kata-kata tersebut adalah sebagai berikut:

1. Beriman  
Bermakna suatu kondisi kehidupan masyarakat yang harmonis melalui penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan.
2. Unggul  
Bermakna unggul dalam kualitas hidup masyarakat dalam pendidikan, kesehatan dan dalam berbagai aspek kehidupan.
3. Sejahtera  
Bermakna bahwa pembangunan ditujukan untuk meningkatnya taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
4. Percepatan Pembangunan Desa  
Bermakna mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat desa dan menumbuhkan kembangkan partisipasi dan tanggung jawab masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

## 5. Berkeadilan

Bermakna mengandung arti adanya kesamaan hak dalam pelayanan kemasyarakatan, keadilan dalam kemanfaatan hasil-hasil pembangunan antar wilayah dan golongan penduduk, serta pemerintahan yang jujur, bersih, efisien dan efektif sebagai gambaran dari *good governance*.

Agenda untuk mewujudkan masyarakat yang beriman dan sejahtera dapat dicapai melalui:

- 1) meningkatkan kualitas moral dan keimanan masyarakat;
- 2) menanggulangi kemiskinan dan ketertinggalan atau ketimpangan pembangunan;
- 3) pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

### C. Aspek Tri Sakti

Daya tahan suatu bangsa terhadap berbagai deraan gelombang sejarah tergantung pada ideologi. Ideologi sebagai penuntun; ideologi sebagai penggerak; ideologi sebagai pemersatu perjuangan; dan ideologi sebagai bintang pengarah. Ideologi itu adalah PANCASILA 1 JUNI 1945 dan TRISAKTI. Selanjutnya penjabaran TRISAKTI diwujudkan dalam bentuk:

1. **Kedaulatan dalam politik** diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kedaulatan rakyat menjadi karakter, nilai, dan semangat yang dibangun melalui gotong royong dan persatuan bangsa.
2. **Berdikari dalam ekonomi** diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional. Negara memiliki karakter kebijakan dan kewibawaan pemimpin yang kuat dan berdaulat dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi rakyat melalui penggunaan sumber daya ekonomi nasional dan anggaran negara untuk memenuhi hak dasar warga negara.

3. **Kepribadian dalam kebudayaan** diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotongroyongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan dan kemaritiman sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi Indonesia masa depan.

Dengan demikian, prinsip dasar TRISAKTI ini menjadi basis sekaligus arah perubahan berdasarkan pada mandat konstitusi dan menjadi pilihan sadar dalam pengembangan daya hidup kebangsaan Indonesia, yang menolak ketergantungan dan diskriminasi, serta terbuka dan sederajat dalam membangun kerjasama yang produktif dalam tataran pergaulan internasional

#### **D. Aspek Tiga dimensi Pembangunan**

1. **Dimensi pembangunan manusia dan masyarakat.**

Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat yang menghasilkan manusia-manusia Indonesia unggul dengan meningkatkan kecerdasan otak dan kesehatan fisik melalui pendidikan, kesehatan dan perbaikan gizi. Manusia Indonesia unggul tersebut diharapkan juga mempunyai mental dan karakter yang tangguh dengan perilaku yang positif dan konstruktif. Karenaitupembangunan mental dan karakter menjadi salah satu prioritas utama pembangunan, tidak hanya di birokrasi tetapi juga pada seluruh komponen masyarakat, sehingga akan dihasilkan pengusaha yang kreatif, inovatif, punya etos bisnis dan mau mengambil risiko, pekerja yang berdedikasi, disiplin, kerja keras, taat aturan dan paham terhadap karakter usaha tempatnya bekerja; serta masyarakat yang tertib dan terbuka sebagai modal sosial yang positif bagi pembangunan, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi sesama.

2. **Dimensi pembangunan sektor unggulan dengan prioritas:**

- Kedaulatan pangan.
- Kedaulatan energi dan ketenagalistrikan.

- Kemaritiman dan kelautan.
- Pariwisata dan industri.

### **3. Dimensi pemerataan dan kewilayahan.**

Pembangunan bukan hanya untuk kelompok tertentu, tetapi untuk seluruh masyarakat di seluruh wilayah. Karena itu pembangunan harus dapat menghilangkan/memperkecil kesenjangan yang ada, baik kesenjangan antarkelompok pendapatan, maupun kesenjangan antarwilayah, dengan prioritas:

- Wilayah desa, untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, karena penduduk miskin sebagian besar tinggal di desa;
- Wilayah pinggiran;

#### **E. Prioritas Nawacita**

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

#### **A. Meningkatkan Kualitas Moral dan Keimanan Masyarakat**

Masyarakat yang sejahtera dan dilandasi dengan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa menjadi agenda pembangunan masyarakat di Kabupaten Seluma dalam dua puluh tahun mendatang. Masyarakat sejahtera dicirikan dengan kecukupan dari berbagai kekurangan yang tidak hanya dilihat dari dimensi fisik tetapi juga dilihat dari dimensi rohani, sehingga untuk mencapai tujuan tersebut tidak cukup hanya mengandalkan pengembangan infrastruktur, ekonomi dan peningkatan perkapita masyarakat saja, tetapi perlu didukung oleh keseimbangan pembangunan moral yang diarahkan pada pembangunan moral keagamaan. Dalam kaitan itu sasaran yang hendak dicapai untuk mewujudkan Kabupaten Seluma yang beriman dan sejahtera dalam 20 tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya masyarakat yang beriman dan sejahtera tanpa meninggalkan kaedah-kaedah dan nilai budaya nenek moyang, sehingga kesejahteraan masyarakat mempunyai arti yang sesuai dengan yang diinginkan;
2. Tercapainya pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan dengan peningkatan kesadaran untuk mendalami nilai-nilai keagamaan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Harapan untuk mewujudkan Kabupaten Seluma dengan rakyatnya yang beriman dan sejahtera dihadapkan oleh berbagai kendala dan tantangan seperti :

1. Keragaman (pluralitas) masyarakat Seluma dengan berbagai etnik, budaya dan agama sehingga untuk mencapai keimanan dan kesejahteraan yang sesuai dengan yang diinginkan perlu digali potensi yang ada di masyarakat secara keseluruhan. Hal ini mengingat penilaian kesejahteraan tidak dapat diukur dengan kacamata fisik semata melainkan adanya keselarasan antar fisik dan rohani.
2. Cepatnya informasi dan pengaruh media massa, sehingga masyarakat dituntut untuk mampu menyaring semua informasi dari media massa tersebut. Kenyataan ini menuntut kesigapan dan ketanggapan Pemerintah Daerah untuk selalu aktif memberikan penyuluhan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak tergilas oleh budaya luar yang tidak sesuai dengan budaya daerah dan lokal.
3. Globalisasi dan modernisasi sering tidak sejalan dengan kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dalam menghadapi hal tersebut. Pemerintah daerah dalam 20 tahun mendatang diharapkan dapat menyediakan sarana dan prasarana, tenaga pendidik dan intelektual yang langsung berinteraksi dengan masyarakat guna mengarahkan masyarakat pada jalur yang sesuai dengan eksistensi daerah dan budaya daerah. Dalam upaya peningkatan perwujudan masyarakat yang beriman dan sejahtera, ada beberapa hal yang harus dilakukan:
  - a. Peningkatan kualitas keimanan dan kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan sebanyak mungkin mengadakan berbagai pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan keagamaan dan ekonomi yang didukung oleh sumber dana, Sumber daya manusia yang berkualitas sehingga terwujud masyarakat yang sejahtera dan madani.

- b. Peningkatan nilai-nilai keagamaan masyarakat di Kabupaten Seluma dengan dukungan tenaga pendidik ditingkat SD, SLTP, SLTA hingga Perguruan Tinggi yang mempunyai kapabilitas dan profesionalisme bidang keilmuan masing-masing. Pemerintah Daerah memfasilitasi tenaga pendidik tersebut untuk dapat meningkatkan keahliannya dengan kesempatan mendapatkan pendidikan dijenjang yang lebih tinggi. Selain itu mengintensifkan pelatihan-pelatihan, baik skala regional, nasional maupun skala internasional.
- c. Membangun sarana dan prasarana penunjang untuk kegiatan-kegiatan keagamaan, sosial budaya, pelatihan keterampilan yang dilengkapi dengan kelengkapan yang memadai.
- d. Peningkatan efisiensi, modernisasi dan nilai tambah sektor keagamaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas dengan mengutamakan pengembangan agribisnis yang dinamis dan efisien yang melibatkan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat. Tujuan ini perlu diselenggarakan melalui revitalisasi kelembagaan pada tingkat daerah, optimalisasi pemanfaatan Sumber daya agar mampu merespon perkembangan zaman, hal ini selain bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, upaya ini juga bermanfaat dalam menciptakan dan menjaga nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat.
- e. Budaya kreatif dan inovatif yang dilandasi dengan nilai-nilai keagamaan terus dikembangkan agar masyarakat Seluma menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan kreativitas ini dilakukan dengan memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dengan cara menggiatkan gemar menulis, gemar membaca, gemar meneliti dan gemar melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- f. Peranan pemerintah daerah Kabupaten Seluma diwujudkan dengan berperan sebagai mediator, motivator, fasilitator sekaligus sebagai katalisator peningkatan keimanan dan kesejahteraan yang pada akhirnya terwujud masyarakat yang mampu mempertahankan keimanan dan meningkatkan kesejahteraannya.

## **B. Menanggulangi Kemiskinan dan Ketertinggalan**

Arah pembangunan jangka panjang dalam penanggulangan kemiskinan dan ketertinggalan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, pekerjaan, air bersih, perumahan dan lain-lain. Dalam hal ini maka arah pembangunan Kabupaten Seluma untuk 20 tahun ke depan antara lain:

1. Pembangunan kesejahteraan dan jaminan sosial, diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan, rehabilitas dan pemberdayaan sosial masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), dengan didukung oleh sistem hukum dan perlindungan sosial, termasuk penyediaan sarana pelayanan sosial yang memadai.
2. Sasaran dari arah kebijakan ini antara lain membebaskan masyarakat dari kemiskinan dan pengangguran. Perekonomian dikembangkan berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi yang memperhatikan kepentingan daerah sehingga terjamin kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat.
3. Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada pemeliharaan dan pemenuhan kebutuhan hak-hak dasar masyarakat secara bertahap dengan mengutamakan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi. Upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan dalam konteks peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang pada gilirannya bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

4. Pembangunan perumahan, bertujuan untuk terpenuhi kebutuhan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat Kabupaten Seluma. Hasil yang diharapkan selama 20 tahun mendatang adalah:
- Terwujudnya sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang ”*market friendly*”, efisien, dan akuntabel serta terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh;
  - Sejalan dengan pemenuhan perumahan yang layak, pembangunan prasarana dan sarana diarahkan pada peningkatan cakupan pelayanan air minum dan sanitasi;
  - Peningkatan proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi dasar yang layak;
  - Penyelenggaraan pembangunan perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung oleh sarana dan prasarana permukiman yang mencukupi dan berkualitas yang dikelola secara profesional, credible, mandiri dan efisien;
  - Penyelenggaraan pembangunan perumahan beserta sarana dan prasarana pendukungnya yang mandiri, mampu membangkitkan potensi pembiayaan yang berasal dari masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pemerataan dan penyebaran pembangunan;
  - Pembangunan perumahan beserta sarana dan prasarana pendukungnya yang memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup.

### C. Pemanfaatan Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Sumberdaya alam harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup, sehingga SDA senantiasa memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Sehingga ada beberapa arah pembangunan dalam pemanfaatan Sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, antara lain:

1. Pendayagunaan SDA yang terbarukan (*renewable resources*) seperti hutan, pertanian, perikanan, dan perairan dilakukan secara rasional, optimal, dan efisien, dengan mendayagunakan seluruh fungsi dan manfaat secara seimbang serta memperhatikan daya dukung dan kemampuan pulih alaminya. Pengelolaan SDA terbarukan yang saat ini sudah berada dalam kondisi yang kritis, diarahkan pada upaya untuk merehabilitasi dan memulihkan daya dukungnya dan selanjutnya diarahkan pada pemanfaatan aspek-aspek tak terwujud seperti jasa lingkungan, sehingga tidak semakin merusak dan menghilangkan kemampuannya sebagai modal bagi pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan. Hasil atau pendapatan yang berasal dari pemanfaatan Sumber daya alam terbarukan diarahkan untuk diinvestasikan kembali guna menumbuhkembangkan upaya pemulihan, rehabilitasi, dan pencadangan untuk kepentingan generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.
2. Sumberdaya alam yang tidak terbarukan (*un-renewable resources*), seperti bahan tambang, mineral dan sumber energi dikelola secara berkelanjutan dengan tidak mengkonsumsi langsung melainkan menggunakannya sebagai input untuk proses produksi berikutnya sehingga dapat menghasilkan nilai tambah yang optimal. Output diarahkan untuk dijadikan sebagai Sumber daya modal yang bersifat kumulatif.

3. Pemanfaatan Sumber daya pertanian yang tersedia di Kabupaten Seluma dilakukan sedemikian rupa agar diperoleh manfaat secara ekonomi yang sesuai dengan daya dukung lingkungan dan tidak bertentangan dengan kehendak masyarakat. Sumber daya pertanian hendaknya dikelola dan dimanfaatkan dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
4. Lahan merupakan komponen Sumber daya pertanian yang paling rentan terhadap proses degradasi. Pemanfaatan Sumber daya lahan secara berkelanjutan diarahkan untuk menjaga keberlangsungan fungsi lahan sebagai media tumbuh tanaman, media penyimpan air, kawasan permukiman, media deposit bagi bahan-bahan yang berbahaya bagi makhluk hidup. Pengelolaan Sumber daya lahan yang sudah berada dalam kondisi kritis diarahkan pada upaya rehabilitasi pemulihan daya dukungnya sehingga produktivitas tetap terjaga.
5. Sumberdaya pesisir dan kelautan mempunyai potensi yang besar untuk dapat dikembangkan. Pembinaan dan penyuluhan secara terus-menerus harus dilakukan pemerintah agar para nelayan dalam menangkap ikan dapat memperhatikan aspek kelestarian lingkungan khususnya kelestarian terumbu karang.
6. Sumber daya kehutanan pemanfaatannya harus dapat memperhatikan kaidah hutan sebagai komponen SDA yang terbarukan. Oleh sebab itu pemanfaatannya harus mengacu pada asas ekonomi, efisiensi dan keberlanjutan. Alih fungsi lahan harus disesuaikan dengan status kawasan tersebut, seperti dikembalikan sebagai kawasan hutan untuk kawasan hutan produksi tetap, atau dikembalikan sebagai kawasan budidaya untuk pemanfaatan kawasan hutan produksi.
7. Sumber daya mineral dan pertambangan merupakan jenis SDA yang tidak terbarukan sehingga pemanfaatannya harus dilakukan dengan sehemat-hematnya. Pengelolaan Sumber daya mineral dan pertambangan diarahkan untuk diproses lebih lanjut sehingga memberikan nilai tambah (*added value*).

8. Reklamasi lahan bekas pertambangan harus dilakukan pengawasan dan dilakukan evaluasi. Dengan dilakukan reklamasi ini maka kerusakan lingkungan sebagai akibat dari pemanfaatan SDA tersebut dapat ditanggulangi.
9. Hasil dan pendapatan dari pengelolaan Sumber daya mineral dan pertambangan diarahkan untuk percepatan pembangunan ekonomi dengan cara menginvestasikannya pada sektor-sektor lain yang memiliki produktivitas yang tinggi. Selain itu hasil tersebut dapat digunakan untuk kegiatan reklamasi dan konservasi terutama terhadap kerusakan lingkungan.
10. Kebijakan penataan lingkungan yang sesuai dengan daya dukungnya diarahkan pada upaya tertatanya wilayah dan ruang sehingga pembangunan dapat dilakukan sesuai dengan daya dukung lingkungan yang tersedia. Daerah-daerah yang sebagian besar merupakan kawasan konservasi perlu mendapat perhatian khusus dalam kaitannya dengan pembangunan kawasan yang berwawasan konservasi SDA dan lingkungan hidup.
11. Pencemaran dan kerusakan lingkungan dikendalikan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan yang baik. Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan harus diterapkan di segala bidang. Pembangunan ekonomi melalui pemanfaatan SDA dan ramah lingkungan sehingga tidak mempercepat terjadinya degradasi dan pencemaran lingkungan. Pemulihan dan rehabilitasi lingkungan diprioritaskan pada upaya-upaya untuk meningkatkan daya dukung lingkungan guna menunjang pembangunan berkelanjutan.
12. Penegakan hukum bagi keselamatan SDA dan lingkungan hidup diarahkan terciptanya jaminan penegakan hukum bagi kelestarian SDA dan lingkungan hidup sehingga tetap tersedia bagi generasi yang akan datang. Kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan perlu ditingkatkan, terutama bagi generasi muda, sehingga tercipta generasi yang peduli terhadap isu-isu SDA dan lingkungan hidup. Generasi muda yang sadar lingkungan diharapkan

dapat menjadi motor penggerak utama pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di masa yang akan datang.

13. Pencapaian pemanfaatan dan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup yang lestari dapat dicapai dengan memperhatikan sistem pengelolaan tanah yang efisien, efektif, serta melaksanakan penegakan hukum terhadap hak atas tanah dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan demokrasi. Selain itu, perlu dilakukan penyempurnaan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah melalui perumusan berbagai aturan pelaksanaan *land reform*, serta penciptaan insentif/disinsentif perpajakan yang sesuai dengan luas, lokasi, dan penggunaan tanah agar masyarakat golongan ekonomi lemah dapat lebih mudah mendapatkan hak atas tanah. Selain itu, menyempurnakan sistem hukum dan produk hukum pertanahan melalui aturan masyarakat adat, serta peningkatan upaya penyelesaian sengketa pertanahan baik melalui hukum positif maupun hukum adat.

#### **D. Fokus Misi Kepala Daerah Terpilih**

Fokus Misi merupakan pejabaran dari Visi yang telah disinkronkan dengan arah kebijakan Bupati Terpilih Periode 2016 – 2021 yakni **H. BUNDRA JAYA,SH, MH** dan **Drs. SUPARTO,M.Si** dan telah dijabarkan dalam urusan pemerintahan konkuren yang ada berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berhubungan dan sinkronisasi dengan bidang Pembagian urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, pariwisata dan Lingkungan Hidup, yakni:

##### ***Misi :***

1. Mendorong serta memfasilitasi tumbuh kembangnya kelembagaan masyarakat pada semua aspek kehidupan dengan memberikan perhatian utama kepada pembangunan perekonomian daerah;
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan potensi unggulan daerah yang bertumpu pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja;

3. Melaksanakan *percepatan pembangunan* dengan meningkatkan pemberdayaan desa secara partisipatif yang didasarkan pada karakteristik dan potensi sumber daya kearifan lokal.

### **3.1 TELAAH RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA**

Rencana strategis dalam lima tahun ke depan dari kementerian dan lembaga serta renstra provinsi merupakan acuan yang mendasar sebagai bentuk kepedulian terhadap kepentingan masyarakat di Indonesia dan provinsi Bengkulu secara khusus yang mana acuan tersebut sebagai dasar bagi Kabupaten seluma untuk menetapkan rencana strategis lima tahun yang akan datang setelah terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati.

Adapun rencana strategis kementerian dan lembaga yaitu :

#### **3.2.1 Kementerian Pertanian**

##### **a. Visi Kementerian Pertanian**

Kabinet Kerja telah menetapkan visi yang harus diacu oleh Kementerian/Lembaga, yaitu "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Dengan memperhatikan visi pemerintah tersebut dan mempertimbangkan masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian, makavisi Kementerian Pertanian adalah : **Terwujudnya Sistem Pertanian Bio industry Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumber daya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani**

## **b. Misi Kementerian Pertanian**

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Pertanian adalah:

1. Mewujudkan kedaulatan pangan.
2. Mewujudkan system pertanian bio industry berkelanjutan.
3. Mewujudkan kesejahteraan petani.
4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi.

## **c. Tujuan**

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Pertanian, maka tujuan pembangunan pertanian periode 2015-2019 yang ingin dicapai yaitu :

1. Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan.
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan dan pertanian.
3. Meningkatkan ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.
5. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional.

## **d. Sasaran Strategis Kementerian Pertanian**

Sasaran strategis merupakan indicator kinerja Kementerian Pertanian dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai dalam dalam periode 2015-2019 adalah :

1. Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula
2. Peningkatan diversifikasi pangan
3. Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor
4. Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi
5. Peningkatan pendapatan keluarga petani
6. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik

**e. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional**

Pembangunan pertanian dalam lima tahun ke depan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke-tiga (2015-2019), dimana RPJMN tersebut sebagai penjabaran dari Visi, Program Aksi Presiden/Wakil Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.

Visi pembangunan dalam RPJM 2015-2019 adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut dijabarkan menjadi Tujuh Misi serta Sembilan Agenda Prioritas (NAWACITA). Dalam aspek ideologi, PANCASILA 1 JUNI 1945 dan TRISAKTI menjadi ideologi bangsa sebagai penggerak, pemersatu perjuangan, dan sebagai bintang pengarah.

Kesembilan Agenda Prioritas (NAWA CITA) limatahun ke depan adalah (1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara, (2) Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, (3) Membangun Indonesia dari pinggiran

dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, (4) Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi system dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, (5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, (6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing dipasar internasional, (7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, (8) Melakukan revolusi karakter bangsa, dan (9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Berdasarkan rincian dari Sembilan Agenda Prioritas (Nawa Cita) tersebut, maka agenda prioritas dibidang pertanian terdiri dari duahal, yaitu (1) Peningkatan Agroindustri, dan (2) Peningkatan Kedaulatan Pangan.

(1) Peningkatan Agroindustri, sebagai bagian dari agenda 6 Nawa Cita (Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing dipasar internasional). Sasaran dari peningkatan agro industry adalah :

- a. meningkatnya PDB Industri Pengolahan Makanan dan Minuman serta produksi komoditas andalan ekspor dan komoditas prospektif,
- b. meningkatnya jumlah sertifikasi untuk produk pertanian yang diekspor, dan
- c. berkembangnya agroindustri terutama diperdesaan. Komoditi yang menjadi fokus dalam peningkatan agroindustri diantaranya kelapa sawit, karet, kakao, teh, kopi, kelapa, mangga, nenas, manggis, salak, kentang.

Untuk mencapai sasaran pokok peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi pertanian yang telah ditetapkan

tersebut, maka arah kebijakan difokuskan pada : (1) peningkatan produktivitas dan mutu hasil pertanian komoditan dalam ekspor, potensial untuk ekspor dan substitusi impor; dan (2) mendorong pengembangan industri pengolahan terutama diperdesaan serta peningkatan ekspor hasil pertanian. Untuk itu strategi yang akan dilakukan meliputi:

- a. Revitalisasi perkebunan dan hortikultura rakyat,
- b. Peningkatan mutu, pengembangan standarisasi mutu hasil pertanian dan peningkatan kualitas pelayanan karantina dan pengawasan keamanan hayati,
- c. Pengembangan agroindustri perdesaan,
- d. Penguatan kemitraan antara petani dengan pelaku/pengusaha pengolahan dan pemasaran,
- e. Peningkatan aksesibilitas petani terhadap teknologi, sumber-sumber pembiayaan serta informasi pasar dan akses pasar
- f. Akselerasi ekspor untuk komoditas-komoditas unggulan serta komoditas prospektif.

(2) Peningkatan Kedaulatan Pangan adalah bagian dari agenda 7 Nawa Cita (Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik). Kedaulatan pangan dicerminkan pada kekuatan untuk mengatur masalah pangan secara mandiri, yang perlu didukung dengan: (i) ketahanan pangan, terutama kemampuan mencukupi pangan dari produksi dalam negeri; (ii) pengaturan kebijakan pangan yang dirumuskan dan ditentukan oleh bangsa sendiri; dan (iii) mampu melindungi dan mensejahterakan pelaku utama pangan, terutama

petani dan nelayan. Selanjutnya, dalam rangka kedaulatan pangan, ketersediaan air merupakan faktor utama terutama untuk meningkatkan dan memperkuat kapasitas produksi. Untuk tetap meningkatkan dan memperkuat kedaulatan pangan, sasaran utama prioritas nasional bidang pangan pertanian periode 2015-2019 adalah:

- a. Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri. Produksi padi diutamakan ditingkatkan dalam rangka swasembada agar kemandirian dapat dijaga. Produksi kedelai diutamakan untuk mengamankan pasokan pengrajin dan kebutuhan konsumsi tahu dan tempe. Produksi jagung ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan keragaman pangan dan pakan lokal. Produksi daging sapi untuk mengamankan konsumsi daging sapi ditingkat rumah tangga, demikian pula produksi gula dalam negeri ditargetkan untuk memenuhi konsumsi gula rumah tangga.
- b. Terwujudnya peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan yang didukung dengan pengawasan distribusi pangan untuk mencegah spekulasi, serta didukung peningkatan cadangan beras pemerintah dalam rangka memperkuat stabilitas harga.
- c. Tercapainya peningkatan kualitas konsumsi pangan sehingga mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 92,5 (2019).
- d. Terbangunnya dan meningkatnya layanan jaringan irigasi 600 ribu Ha untuk menggantikan alih fungsi lahan.
- e. Terlaksananya rehabilitasi 1,75 juta Ha jaringan irigasi sebagai bentuk rehabilitasi prasarana irigasi sesuai dengan laju deteriorasi.

- f. Beroperasinya dan terpeliharanya jaringan irigasi 2,95 juta Ha.
- g. Terbangunnya 132 ribu Ha layanan jaringan irigasi rawa untuk pembangunan lahan rawa yang adaptif dengan menyeimbangkan pertimbangan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Arah kebijakan umum kedaulatan pangan dalam RPJMN 2015-2019 adalah: pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok, stabilisasi harga bahan pangan, terjaminnya bahan pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat serta meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha pangan. Arah kebijakan Pemantapan Kedaulatan Pangan tersebut dilakukan dengan 5 strategi utama, meliputi:

- a. Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi dalam negeri, yang meliputi komoditas padi, jagung, kedelai, daging, gula, cabai dan bawang merah.
- b. Peningkatan kualitas Distribusi Pangan dan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Pangan.
- c. Perbaikan kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat
- d. Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan dilakukan terutama mengantisipasi bencana alam dan dampak perubahan iklim dan serangan organisme tanaman dan penyakit hewan.
- e. Peningkatan kesejahteraan pelaku utama penghasil bahan pangan.

#### **f. Strategi Kementerian Pertanian**

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, maka Kementerian Pertanian menyusun dan melaksanakan **Tujuh Strategi Utama Penguatan Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP)** sebagai berikut:

1. Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan
2. Peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian
3. Pengembangan dan perluasan logistic benih/bibit
4. Penguatan kelembagaan petani
5. Pengembangan dan penguatan pembiayaan pertanian
6. Pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergi
7. Penguatan jaringan pasar produk pertanian

Selain tujuh strategi utama, terdapat Sembilan Strategi Pendukung sebagai berikut:

1. Penguatan dan peningkatan kapasitas SDM pertanian
2. Peningkatan dukungan perkarantinaaan
3. Peningkatan dukungan inovasi dan teknologi
4. Pelayanan informasi publik
5. Pengelolaan regulasi
6. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi
7. Pengelolaan perencanaan
8. Penataan dan penguatan organisasi
9. Pengelolaan sistem pengawasan

### **3.2.2 Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan**

#### **a. Visi, Misi dan Arah Kebijakan**

Visi pembangunan nasional Tahun 2015-2019 adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Misi yang diemban untuk memenuhi visi

yang telah dirumuskan adalah: (1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;(2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum; (3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim; (4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; (5) Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing; (6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; dan, (7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan 9 agenda pembangunan Tahun 2015-2019, yang didalamnya memuat sub agenda dan sasaran yang hendak dicapai dan menjadi amanat bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pelaksanaan pembangunan dibagi ke dalam : prioritas nasional, yang memuat sasaran pembangunan yang memiliki kaitan langsung dengan janji Presiden dan Wakil Presiden; prioritas bidang, yang memuat sasaran yang memiliki kaitan terhadap bidang sumber daya alam dan lingkungan untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan lintas bidang yang sarasannya merupakan hasil kerja bersamalintas kementerian.

Berangkat dari pandangan, harapan dan permasalahan yang ada, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2015-2019, yaitu **memastikan kondisi lingkungan berada padatoleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman,serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumber daya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.**

Berdasarkan tujuan pembangunan ini, peranutama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015-2019 yang akan diusung, adalah : (1) Menjaga kualitas LH yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim; (2) Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta *endangered species*; (3) memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumber daya alam.

Selanjutnya, untuk memastikan peran pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dirumuskan sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sasaran strategis ini akan menjadi panduan dan mendorong arsitektur kinerja tahun 2015-2019.

Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 adalah : (1) Menjagakualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan; (2) Memanfaatkan potensi Sumber daya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNBPN. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor; dan,(3) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan

SDA sebagai system penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perisak ozon, dan lain-lain).

**b. Arah Kebijakan dan Kerangka Kelembagaan**

Agenda pembangunan nasional yang terkait langsung dengan pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah : (1) agenda memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; (2) agenda pembangunan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing dipasar internasional; dan (3) agenda mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Untuk prioritas pembangunan bidang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan masuk pada bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang merupakan modal utama pembangunan untuk meningkatkan daya saing ekonomi berbasis SDA dan LH.

- a. Peningkatan produksi hasil hutan dan pengembangan jasa lingkungan
- b. Peningkatan konservasi dan tata kelola hutan serta pengelolaan DAS
- c. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengembangan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan dan pelestarian dan pemanfaatan keekonomian kehati

- d. Penanganan perubahan iklim dan peningkatan kualitas informasi iklim dan kebencanaan.

### 3.2.3 Kementerian ESDM

#### A. Visi dan Misi

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka **Visi Pembangunan Nasional untuk tahun 2015-2019** adalah :  
**“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”**

Upaya untuk mewujudkan Visi ini adalah melalui **7 Misi Pembangunan**, yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan Negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melaksanakan Visi dan Misi Pembangunan Nasional tersebut, khususnya bidang Energi

dan Sumber Daya Mineral dengan menetapkan Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Strategi yang lebih operasional dengan mengacu pada RPJMN 2015-2019.

Sesuai dengan visi pembangunan “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, maka **Pembangunan Nasional tahun 2015-2019 akan diarahkan untuk mencapai sasaran utama** yang mencakup:

1. Sasaran Makro;
2. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
3. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan;
4. Sasaran Dimensi Pemerataan;
5. Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antar wilayah;
6. Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

Dalam RPJMN Tahun 2015-2019, ESDM utamanya terkait dengan **Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan, yang didalamnya** terdapat **sasaran Kedaulatan Energi**, sebagaimana dapat terlihat pada table dibawah ini. Sasaran Kedaulatan Energi tersebut merupakan *Key Performance Indikator* (KPI) ESDM dalam skala nasional.

## **B. Tujuan Kementerian dan Sasaran Strategi ESDM**

Tujuan merupakan intisari dari visi, yaitu kondisi yang ingin dicapai pada tahun 2019. Tujuan tersebut merupakan suatu kondisi yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas dan fungsi ESDM. Masing-masing tujuan memiliki sasaran dan indikator kinerja yang harus dicapai melalui strategi yang tepat, serta juga harus dapat menjawab tantangan yang ada.

Di dalam Renstra ESDM Tahun 2015-2019, sasaran pembangunan nasional bidang energi tersebut, dijabarkan lebih rinci yang juga mencakup Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

yang menjadi lingkup tugas dan tanggung jawab ESDM sebagaimana dapat terlihat pada table dibawah ini.

#### 3.2.4 Kementerian Pariwisata

##### A. Visi Pembangunan Nasional Tahun 2015 - 2019

**“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DANBERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”**

##### B. Misi Pembangunan Nasional Tahun 2015 – 2019

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan Nasional Tahun 2015 - 2019 yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

### **C. Tujuan Pembangunan Pariwisata Tahun 2015 - 2019**

Berdasarkan misi Pembangunan Pariwisata Tahun 2015-2019, maka berikut ini adalah tujuan pembangunan pariwisata tahun 2015-2019 dalam Rencana Strategis Kementerian Pariwisata yaitu :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang berdaya saing di pasar internasional ;
2. Mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional sehingga Indonesia dapat mandiri dan bangkit bersama bangsa Asia lainnya;
3. Memasarkan destinasi pariwisata Indonesia dengan menggunakan strategi pemasaran terpadu secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab serta yang intensif, inovatif dan interaktif sehingga kinerja pemasaran pariwisata mencapai produktifitas maksimal; dan
4. Mengembangkan Kelembagaan Kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien, dan mencapai produktifitas maksimal

### **D. Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka**

Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan pengembangan destinasi dan industri pariwisata tahun 2015 – 2019 secara substansial mengacu pada norma peraturan perundangan : (1) Undang-undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; (2) Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025 ;(3) Peraturan Presiden No 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019 serta (4) Peraturan Menteri tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2015 – 2019. Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata dalam UU no 10

Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan PP no 50 Tahun 2011 tentang RIPPARNAS tahun 2010 – 2025.

Pembangunan kepariwisataan nasional meliputi 4 (empat) pilar pembangunan yaitu : (1) Destinasi Pariwisata; (2) Industri Pariwisata; (3) Pemasaran pariwisata; dan (4) Kelembagaan Kepariwisata. Dalam konteks arah kebijakan dan strategi untuk pengembangan destinasi dan industri pariwisata, maka pengembangan destinasi pariwisata nasional (DPN) meliputi :

- a) Perwilayahan Pembangunan DPN;
- b) Pembangunan Daya Tarik Wisata;
- c) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata;
- d) Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata;
- e) Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata; dan
- f) pengembangan investasi di bidang pariwisata.

Dengan arah kebijakan dan strategi pembangunan destinasi pariwisata adalah upaya terpadu dan sistematis seluruh komponen Destinasi Pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan Kepariwisata serta kemudahan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata.

- a) penguatan struktur Industri Pariwisata;
- b) peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c) pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata;
- d) penciptaan kredibilitas bisnis; dan
- e) pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Dengan arah kebijakan dan strategi Pembangunan Industri Pariwisata adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur Industri Pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

### **3.3 TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGI**

Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, terkait dengan Suber Daya Alam. Ektensifikasi Sumber Daya Alam yang sudah dilakukan dengan cara pendataan dokumen pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, pertambangan dan energi yang belum didata dan juga dengan melakukan pendataan ulang terhadap data tersebut yang mengalami perubahan. Dengan melakukan pendataan tersebut diharapkan dapat mengetahui kondisi pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, pertambangan dan energi baik secara kuantitatif maupun kualitatif antara lain dengan cara memantau lingkungan hidup, sosialisasi dan pendataan langsung terhadap sumber daya alam.

**Tabel 3.2**  
**Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Bagian Administrasi Sumber**  
**Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma**

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan Dinas Pendapatan	Catatan bagi Perumusan Program
1	2	3	4	5
1.	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Terbatasnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Kajian dan pemanfaatan lahan terkait dengan Pertanian	Rapat Koordinasi Peningkatan perekonomian petani, Fasilitasi Pertumbuhan Ekonomi
2.	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup	Pembangunan menyebabkan penyusutan dan perusakan LH	Kajian tentang dampak dan resiko LH terkait dengan Lingkungan Hidup	1). Pemantauan Limbah Perusahaan, Udara dan Air 2). Pemantauan Kualitas
3.	Kinerja layanan/jasa ekosistem	Menurunnya kualitas lingkungan	Kajian Peningkatan kualitas Lingkungan terkait dengan Sumber Daya Alam	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Sumber Daya Alam
4.	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	Pembatasan pemanfaatan SDA	Kajian Pemanfaatan SDA terkait dengan Potensi Sumber Daya Alam	Pendataan Potensi dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam.
5.	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Menurunnya kelestarian akibat perubahan iklim	Kajian dampak perubahan iklim terhadap LH terkait dengan Lingkungan Hidup	Pemantauan Kualitas Udara
6.	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	Berkurangnya ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	Kajian dan penanggulangan keanekaragaman hayati terkait dengan Sumber Daya Alam	1). Pemantauan keragaman hayati dan potensi keragaman Hayati.

### 3.4 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGI

Berdasarkan permasalahan baik yang ada di Kabupaten Seluma dan berdasarkan RPJMD serta Renstra K/L Dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota maka isu-isu strategi yang diangkat yaitu :

1. Lemahnya kelembagaan masyarakat berbasis keunggulan lokal
2. Masih Kuranya nilai tambah dan daya saing produk pertanian.
3. Masih Lemahnya tingkat pendapatan kesejahteraan petani.
4. Masih Lemahnya Kesadaran Masyarakat dan Perusahaan terhadap kepedulian Lingkungan Hidup
5. Tingkat konservasi dan tata kelola hutan yang belum maksimal
6. Masih Banyaknya masyarakat yang menderita penyakit akibat dari Pencemaran lingkungan hidup

**BAB IV**  
**VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI**  
**BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA**  
**ALAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SELUMA**

**4.1 Visi dan Misi OPD**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kabupaten Seluma menetapkan Visi dan Misi sebagai pedoman pencapaian tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dan dijalankan dalam rencana kerja tahunan sebagai aksi pelaksanaan program dan operasional kegiatan.

Adapun Visi dan Misi tersebut adalah sebagai berikut:

**VISI :**

*”Terwujudnya Professionallisme kerja Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup dan Pelayanan di Bidang Perekonomian, Pengelolaan Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam dan Energi Sumber Daya Mineral”*

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang diemban Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kabupaten Seluma, maka misi yang dirumuskan adalah :

1. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur yang handal melalui pendidikan pelatihan, bimbingan teknis, kursus dan lain-lain dalam rangka tercapainya disiplin kerja dan profesionalitas kerja ASN serta meningkatnya ketrampilan kerja masyarakat;
2. Tersediannya dana dan sarana yang cukup untuk menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup, pelayanan di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Energi Sumber Daya Mineral, Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peningkatan kinerja UKM dan menjaga ketersediaan sembilan bahan pokok serta memajukan destinasi wisata lokal dan lingkungan pertambangan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## 4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH OPD

Berdasarkan Misi Visi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu **“Mengembangkan dan memperkuat pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang bertumbuh pada pengembangan potensi lokal unggulan melalui sinergi fungsi-fungsi industri, pertanian, pariwisata, dan sektor lainnya, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan”**. Serta visi dan misi Bagian Administrasi Sumber Daya Alam maka tujuan dan sasaran Jangka Menengah OPD yaitu :

### 4.2.1 Tujuan Jangka Menengah OPD

1. Melakukan koordinasi dan konsultasi ke Kementerian/Lembaga/Instansi terkait.
2. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah yang amanah dan profesional.
3. Memajukan destinasi wisata lokal dan Lingkungan pertambangan.
4. Meningkatkan kelembagaan masyarakat berbasis keunggulan lokal serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.
5. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan , pertanian dan produk industri kecil menengah
6. Menjaga kestabilan harga dan ketersediaan Sembilan bahan pokok
7. Pemberantasan tindakan penebangan liar, perikanan liar dan penambangan liar
8. Peningkatan kinerja UKM
9. Peningkatan konservasi dan tata kelola hutan
10. Perbaiki kualitas lingkungan hidup.

### 4.2.2 Sasaran

1. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik dan profesional di bidangnya sesuai dengan aturan yang berlaku
2. Meningkatkan kesadaran perusahaan sawit, karet, pertambangan dan pertambangan rakyat serta masyarakat dalam rangka menjaga

- kelestarian ekosistem alam dan lingkungan perusahaan
3. Melibatkan masyarakat di sekitar kawasan destinasi wisata dalam rangka memajukan sektor wisata
  4. Meningkatkan keahlian petani dengan cara mengadakan pelatihan dan menjaga stok bahan pokok
  5. Peningkatan kelembagaan masyarakat berbasis keunggulan lokal dan Peningkatan pendapatan keluarga petani.
  6. Menurunkan angka penebangan liar dan penambangan Liar
  7. Melatih dan memfasilitasi UKM agar terus dapat eksis dalam rangka meningkatkan kinerja usaha yang dikelolanya
  8. Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi permintaan pasar
  9. Meningkatkan konservasi dan tata kelola hutan
  10. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
  11. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
  12. Meningkatkan sikap dan perilaku hidup masyarakat yang peduli terhadap alam dan lingkungan

### **4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Maka strategi dan kebijakan yang akan dilakukan yaitu:

1. Penguatan kelembagaan petani
2. Melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada kelompok tani
3. Kordinasi dan pembinaan kepada masyarakat dan perusahaan dalam pengolahan sumber daya alam
4. Menumbuh kembangkan sikap peduli terhadap alam dan lingkungan kepada masyarakat dan perusahaan

**BAB V**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA**  
**KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Rencana Kerja Startegis (Renstra) Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2016-2021 ini merupakan rencana kerja Lima tahunan dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Tahun 2018. Rencana Kerja Startegis (Renstra) Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana Tahun Anggaran 2018 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Startegis(Renstra) Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2016-2021, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama OPDdi lingkup Sekretariat Kabupaten Seluma maupun dengan OPD yang membidangi fungsi lain.

Adapun Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapa dilihat pada lampiran.

**BAB VI**  
**INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN**  
**DAN SASARANRPJMD**

Program OPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per OPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan OPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing- masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah OPD.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan OPD. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. Perumusan program dan rencana kegiatan tahun 2016-2021 dapat dilihat di lampiran 1.

Rencana Strategis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan saran dan rekomendasi yang konstruktif guna penyempurnaan. Semoga Rencana Strategis ini dapat menjadi acuan dan pedoman di Bagian Perekonomian dan SDA Kabupaten Seluma.

Demikianlah, Renstra tahun 2016-2021 ini kami susun dan buat. Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tais, Februari 2019

Kabag Adm. Perekonomian dan SDA,



**ZURAINI, SP, M,SI**

NIP. 19730301 200604 2 002

## LAMPIRAN LAMPIRAN

### Pencapaian Kinerja Bagian Perekonimian dan Sumber Daya Alam Kabupaten Seluma

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target RENSTRA SKPD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Pencapaian				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	<i>Adanya rumusan kebijakan yang menunjang berkembang perekonomian daerah</i>			SKPD	3	3	3	4	4	0	0	1	1	2	0%	0%	33%	25%	50%
2	Pelatihan Tenun Bumpak			KELOMPOK UKM	2	2	3	3	4	1	1	1	2	3	50%	50%	33%	67%	75%
3	Stabilitas harga bahan pokok			PASAR/TOKO	5	5	10	10	14	4	4	8	9	13	80%	80%	80%	90%	93%
4	Tidak terjadinya lonjakan harga			PASAR/TOKO	2	2	2	3	3	1	1	2	3	3	50%	50%	100%	100%	100%
5	Perusahaan Perkebunan Sawit dan Karet yang ada dalam wilayah Kabupaten Seluma melaksanakan tata kelola Limbah, Kualitas Air dan Udara dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku			PERUSAHAAN	3	3	4	4	5	2	3	3	4	5	67%	100%	75%	100%	100%
6	Sumber Daya Alam dan Energi Sumber Daya Mineral yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat			PERTAMBANGAN	1	1	2	2	3	0	0	1	2	2	0%	0%	50%	100%	67%
7	Sumber Daya Alam dan Energi Sumber Daya Mineral dapat meningkatkan PAD bagi Kabupaten Seluma dan dapat menjadi ajang memperkenalkan daerah			PERTAMBANGAN	1	1	2	2	3	0	0	1	1	2	0%	0%	50%	50%	67%

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam  
Kabupaten Seluma**

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke					Rasio realisasi dan anggaran tahun Ke					
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>																
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.000.000	15.000.000	15.000.000	17.000.000	17.000.000	14.000.000	15.000.000	15.000.000	16.832.000	16.950.000	100%	100%	100%	99%	100%
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4.000.000	9.420.000	12.000.000	15.000.000	15.000.000	4.000.000	4.685.000	9.896.000	14.968.000	14.896.000	100%	50%	82%	100%	99%
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.000.000	-	-	-	-	12.000.000	-	-	-	-	100%	0%	0%	0%	0%
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	72.000.000	67.000.000	80.000.000	81.042.700	81.042.700	71.500.000	57.324.000	74.700.000	80.142.700	80.050.400	99%	86%	93%	99%	99%
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	-	8.000.000	8.000.000	7.999.000	8.999.000	-	6.000.000	8.000.000	7.999.000	8.450.000	0%	75%	100%	100%	94%
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	60.000.000	28.000.000	17.882.000	18.900.000	18.900.000	59.700.000	28.000.000	17.882.000	18.900.000	18.900.000	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	39.000.000	15.000.000	9.500.000	10.000.000	10.000.000	38.150.000	15.000.000	9.400.000	10.000.000	10.000.000	98%	100%	99%	100%	100%
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	2.750.000	3.000.000	3.000.000	0%	100%	92%	100%	100%
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	22.000.000	15.400.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	22.000.000	15.400.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	100%	100%	100%	100%	100%
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	107.000.000	240.000.000	80.000.000	72.850.000	82.850.000	106.250.000	239.816.400	79.013.600	72.840.500	81.850.400	99%	100%	99%	100%	99%
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>																
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	46.000.000	35.000.000	-	-	-	46.000.000	33.650.000	-	-	-	100%	96%	0%	0%	0%

	Pengadaan peralatan gedung kantor	38.000.000	25.000.000	-	-	-	38.000.000	20.900.000	-	-	-	100%	84%	0%	0%	0%
<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR</b>																
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	-	15.000.000	16.516.300	17.516.300	-	-	15.000.000	16.000.000	16.500.300	0%	0%	100%	97%	94%
<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>																
	Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Keuangan	-	-	10.000.000	-	-	-	-	9.834.500	-	-	0%	0%	98%	0%	0%
<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>																
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	27.000.000	-	-	-	-	27.000.000	-	-	-	-	100%	0%	0%	0%	0%
<b>PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI</b>																
	Peningkatan Kegiatan, Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	92.000.000	-	-	-	-	92.000.000	-	-	-	-	100%	0%	0%	0%	0%
	Monitoring Pelaksanaan Investasi dan Penanaman Modal	-	30.000.000	-	-	-	-	15.450.000	-	-	-	0%	52%	0%	0%	0%
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH</b>																
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Industri	125.750.000	-	-	-	-	125.700.000	-	-	-	-	100%	0%	0%	0%	0%
	Pemberian Kemudahan Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah	-	-	-	28.500.400	29.500.000	-	-	-	27.500.000	29.000.000	0%	0%	0%	96%	98%
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF UKM</b>																
	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD	102.300.000	25.000.000	-	-	41.000.000	100.300.000	-	-	-	-	98%	0%	0%	0%	0%
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL</b>																
	Pendidikan dan Pelatihan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Organisasi dan Badan Hukum Koperasi	57.700.000	-	-	-	56.740.000	-	-	-	-	-	98%	0%	0%	0%	0%
	Pengembangan Kewirausahaan Kompetitif UKM	84.200.000	-	-	-	83.986.000	-	-	-	-	-	100%	0%	0%	0%	0%

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR																
	Sinkronisasi dan Pemantauan Dunia Usaha	77.000.000	25.000.000	-	-	-	76.596.000	12.600.000	-	-	-	99%	50%	0%	0%	0%
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI																
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	82.000.000	-	-	-	-	82.000.000	-	-	-	-	100%	0%	0%	0%	0%
PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN INFLASI																
	Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah	76.950.000	40.000.000	102.600.000	44.142.300	54.144.500	75.900.000	38.280.500	97.968.000	44.140.000	54.100.500	99%	96%	95%	100%	100%
	Peningkatan Pengawasan dan Pemantauan Sembilan Bahan Pokok	113.500.000	25.000.000	30.000.000	31.020.600	31.040.000	111.790.000	24.000.000	30.000.000	31.000.600	31.020.600	98%	96%	100%	100%	100%
PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA-USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF																
	Perencanaan, Koordinasi, dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah	-	-	173.100.000	46.799.800	56.799.000	-	-	171.600.000	46.699.800	56.759.000	0%	0%	99%	100%	100%
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SDA																
	Pengendalian dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam	100.000.000	-	-	-	-	100.000.000	-	-	-	-	100%	0%	0%	0%	0%
	Koordinasi Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam	150.000.000	-	-	-	-	150.000.000	-	-	-	-	100%	0%	0%	0%	0%
	Penyusunan Profil Menuju Indonesia Hijau	96.877.500	-	-	-	-	93.877.500	-	-	-	-	97%	0%	0%	0%	0%
	Pemantauan Limbah Perusahaan	-	71.000.000	-	39.596.800	49.600.000	-	60.370.000	-	38.590.800	49.500.000	0%	85%	0%	97%	100%
	Pemantauan Kualitas Air Terbentuk Tersedia dan Beroperasi Pada DAS prioritas Secara Kontinyu	-	70.000.000	-	42.724.200	44.725.000	-	53.099.400	-	42.324.200	44.525.000	0%	76%	0%	99%	100%
	Pemantauan dan Pengendalian Limbah, Kualitas Air dan Udara	-	-	179.000.000	-	-	-	-	159.109.200	-	-	0%	0%	89%	0%	0%
PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SDA																

Perencanaan dan Penyusunan Program Pembangunan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	109.100.000	30.000.000	-	41.601.200	51.500.000	108.950.000	14.670.000	-	40.901.200	50.790.500	100%	49%	0%	98%	99%
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN dan PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>															
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	-	-	-	30.019.800	30.120.000	-	-	-	28.018.600	29.780.400	0%	0%	0%	93%	99%
<b>PROGRAM KOORDINASI PEMBINAAN SDA</b>															
Sosialisasi Pembinaan Pertanian SDA	97.600.000	50.000.000	-	-	-	97.600.000	49.440.000	-	-	-	100%	99%	0%	0%	0%
Koordinasi dan Monitoring Evaluasi Pertanian SDA	100.000.000	-	-	-	-	100.000.000	-	-	-	-	100%	0%	0%	0%	0%
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN</b>															
Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pertambangan	-	-	35.700.000	-	-	-	-	33.505.000	-	-	0%	0%	94%	0%	0%
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA</b>															
Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri	-	-	-	15.860.600	16.960.500	-	-	-	14.960.200	15.980.000	0%	0%	0%	94%	94%
Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	-	-	64.000.000	12.051.800	13.050.000	-	-	60.312.500	11.951.600	12.986.000	0%	0%	94%	99%	100%

## TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator	Target				
						2016	2017	2018	2019	2020
Terwujudnya Profesionalisme kerja Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup dan Pelayanan di Bidang Perekonomian, Pengelolaan Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam dan Energi Sumber Daya Mineral	Meningkatkan Sumber Daya Aparatur yang handal melalui pendidikan pelatihan, bimbingan teknis, kursus dan lain-lain dalam rangka tercapainya disiplin kerja dan profesionalitas kerja ASN serta meningkatnya ketrampilan kerja masyarakat	Melakukan koordinasi dan konsultasi ke Kementerian/Lembaga/Instansi terkait	Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik dan profesional di bidangnya sesuai dengan aturan yang berlaku	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	ASN Bagian Adm. Perekonomian dan SDA	93,5	95,9	96,6	99,7	100
		Meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah yang amanah dan profesional	Melakukan koordinasi dan konsultasi ke Kementerian/Lembaga/Instansi terkait	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	ASN Bagian Adm. Perekonomian dan SDA	75	85	94	97	100
	Tersediannya dana dan sarana yang cukup untuk menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup, pelayanan di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Energi Sumber Daya Mineral, Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peningkatan kinerja UKM dan menjaga ketersediaan sembilan bahan pokok serta memajukan destinasi wisata lokal dan lingkungan pertambangan dengan berpedoman pada	Memajukan destinasi wisata lokal dan lingkungan pertambangan	Melibatkan masyarakat di sekitar kawasan destinasi wisata dalam rangka memajukan sektor wisata	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Objek wisata	80	80	94	96	97
		Meningkatkan kelembagaan masyarakat berbasis keunggulan lokal serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.	Meningkatkan keahlian petani dengan cara mengadakan pelatihan dan menjaga stok bahan pokok	Program Peningkatan Pengendalian Inflasi	Pedagang dan Konsumen	75	85	90	90	95

peraturan perundang-undangan yang berlaku	Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan , pertanian dan produk industri kecil menengah.	Peningkatan kelembagaan masyarakat berbasis keunggulan lokal dan Peningkatan pendapatan keluarga petani	Program Penciptaan Iklim Usaha-Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	Pengendalian UKM dan optimalisasi UKM pengrajin kain tenun bumpang	55	65	75	85	95
	Menjaga kestabilan harga dan ketersediaan Sembilan bahan pokok	Menurunya angka penebangan liar dan penambangan Liar	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Sumber Daya Alam yang berorientasi pada lingkungan hidup	50	60	70	80	90
	Pemberantasan tindakan penebangan liar, perikanan liar dan penambangan liar	Menurunya angka penebangan liar dan penambangan Liar	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Perusahaan pertambangan	30	40	60	75	80
	Peningkatan Kinerja UKM	Melatih dan memfasilitasi UKM agar terus dapat eksis dalam rangka meningkatkan kinerja usaha yang dikelolanya	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Kelompok IKM dan UKM	75	85	90	95	100
		Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi permintaan pasar	Program Pengembangan Kewirausahaan Kompositif UKM	Pelatihan bagi pengelola koperasi	45	55	65	75	80
	Peningkatan konservasi dan tata kelola hutan	Meningkatkan konservasi dan tata kelola hutan	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Perusahaan dan DAS	65	75	80	85	90
	Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup	Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup							
		Meningkatkan kualitas lingkungan hidup							

		Meningkatkan sikap dan perilaku hidup masyarakat yang peduli terhadap alam dan lingkungan								
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

## TUJUAN , SASARAN, PROGRAM KEGIATAN

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat menyurat	1500	1500	1550	1600	1600	1600
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan jasa Surat menyurat	75	75	75	80	80	80
		2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Jumlah Tagihan Telepon	80	80	85	85	90	95
		3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Adanya Peralatan Kantor untuk kelancaran tugas ASN	65	75	75	85	85	90
		4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Pajak Kendaraan Dinas	60	60	75	75	85	90
		5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Adanya Peralatan Kantor untuk kelancaran tugas ASN	100	100	100	100	100	100
		6 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas dan jumlah ATK	75	80	85	90	95	100
		7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan	85	85	85	85	90	90
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Adanya peratalan listrik dan penerangan kantor	75	75	85	85	90	90	

		9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan minum dan jumlah biaya makan minum	80	80	80	90	90	100
		10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dinas dan jumlah perjalanan dinas Aparatur	100	100	100	100	100	100
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Persentase Ketersediaan perlengkapan gedung kantor	60	60	60	80	85	85
		2	Pengadaan peralatan gedung kantor	Persentase ketersediaan peralatan kerja kantor	60	60	60	80	85	85
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Tersediannya Pakaian dinas dan jumlah pakaian dinas beserta peralatannya	25	35	75	80	100	100
<b>4</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Fungsional	6	6	6	8	8	8
<b>5</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	1	Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Capaian Kinerja	Nilai evaluasi AKIP	C	C	CC	B	B	A
				Adanya Dokumen RENSTRA, RENJA, LAKIP, RKA, DPA dan DPPA pada Bagian Perekonomian dan SDA	7	7	7	7	7	7
<b>6</b>	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>	1	Peningkatan Kegiatan, Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase peningkatan promosi dan kerjasama investasi	4	4	5	5	6	6
		2	Monitoring Pelaksanaan Investasi dan Penanaman Modal	Terlaksananya monitoring pelaksanaan Investasi dan Penanaman modal di	8	8	9	9	10	10

				kabupaten seluma							
7	<b>Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</b>	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Industri	Tata cara tentang pengembangan industri	2	2	3	3	4	4	
		2	Pemberian Kemudahan Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah	Jumlah Kelompok IKM dan UKM	1	1	1	1	2	2	
8	<b>Program Pengembangan Kewirausahaan dan Meunggulan Kompetitif UKM</b>	1	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD	Mensosialisasikan tentang pengelolaan koperasi	13	13	17	22	26	26	
9	<b>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil</b>	1	Pendidikan dan Pelatihan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Organisasi dan Badan Hukum Koperasi	Jumlah Pelaksanaan Evaluasi dan expose	12	12	12	12	12	12	
		2	Pengembangan Kewirausahaan Kompetitif UKM	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan	1	1	1	1	1	1	
10	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor</b>	1	Sinkronisasi dan Pemantauan Dunia Usaha	Pemantauan usaha-usaha yang ada di Kabupaten Seluma	12	12	12	12	12	12	
11	<b>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</b>	1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kelompok Koperasi yang ada di Kabupaten Seluma	24	24	24	24	24	24	
12	<b>Program Peningkatan Pengendalian Inflasi</b>	1	Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah	Pengendalian harga bahan pokok dan peserta RAKOR TPID	3	4	4	6	6	8	

		2	Peningkatan Pengawasan dan Pemantauan Sembilan Bahan Pokok	Pengawasan dan pemantauan sembilan bahan pokok dan jumlah pedagang yang akan diawasi	4	4	4	5	5	5
<b>13</b>	<b>Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif</b>	1	Perencanaan, Koordinasi, dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Memperkuat pembinaan dan pelatihan terhadap BUMDes dan UKM	5	5	10	15	20	25
<b>14</b>	<b>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</b>	1	Pengendalian dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam	Adanya pengendalian dan pemanfaatan Sumber Daya Alam	10	10	25	51	51	51
		2	Koordinasi Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam	Terlaksananya Koornidasi pada ASN Bagian Pereonomian dan SDA dalam pengelolaan Konservasi SDA	5	10	25	25	51	51
		3	Penyusunan Profil Menuju Indonesia Hijau	Adanya buku profil menuju Indonesia hijau	5	5	10	15	20	25
		4	Pemantauan Limbah Perusahaan	Perusahaan yang ada dalam wilayah Kabupaten Seluma	3	3	4	4	5	5
		5	Pemantauan Kualitas Air Terbentuk Tersedia dan Beroperasi Pada DAS prioritas Secara Kontinyu	DAS yang ada dalam wilayah Kabupaten Seluma	3	3	4	4	5	5
		7	Pemantauan dan Pengendalian Limbar, Kualitas Air dan Udara	Pemantauan limbah perusahaan, pemantauan kualitas air dan udara perusahaan yang ada dalam wilayah Kabupaten Seluma	5	10	25	51	51	51

15	<b>Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam</b>	1	Perencanaan dan Penyusunan Program Pembangunan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Sumber Daya Alam yang berbasis lingkungan dalam wilayah Kab. Seluma	40	40	60	80	80	80
16	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>	1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	Melibatkan dan mengedukasi masyarakat dalam hal pengendalian lingkungan hidup	15	20	20	20	20	20
17	<b>Program Koordinasi Pembinaan Sumber Daya Alam</b>	1	Sosialisasi Pembinaan Pertanian SDA	Mensosialisasikan tentang pertanian dan kelompok tani	25	35	75	80	100	100
		2	Koordinasi dan Monitoring Evaluasi Pertanian SDA	Adanya Koordinasi, monitoring dan evaluasi pertanian SDA Wilayah Kabupaten Seluma	5	5	6	6	7	7
18	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan</b>	1	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pertambangan	Perusahaan-perusahaan pertambangan yang ada dalam wilayah Kabupaten Seluma	40	40	40	40	40	40
19	<b>Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata</b>	1	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri	Jumlah event tingkat Internasional promosi pariwisata yang kreatif dan unggul	1	1	1	2	2	2
		2	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pemantauan objek wisata yang ada dalam wilayah Kabupaten Seluma	1	1	1	2	2	2

## RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

No	Program	Kegiatan	Pendanaan Indikatif					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.000.000	15.000.000	15.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000
		2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4.000.000	9.420.000	12.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
		3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.000.000	-	-	-	-	-
		4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	72.000.000	67.000.000	80.000.000	81.042.700	81.042.700	81.042.700
		5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	-	8.000.000	8.000.000	7.999.000	8.999.000	8.999.000
		6 Penyediaan Alat Tulis Kantor	60.000.000	28.000.000	17.882.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000
		7 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	39.000.000	15.000.000	9.500.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
		8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		9 Penyediaan Makanan dan Minuman	22.000.000	15.400.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000
		10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	107.000.000	240.000.000	80.000.000	72.850.000	82.850.000	92.850.000

<b>TOTAL</b>			<b>330.000.000</b>	<b>400.820.000</b>	<b>253.382.000</b>	<b>253.791.700</b>	<b>264.791.700</b>	<b>274.791.700</b>
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	46.000.000	35.000.000	-	-	-
		2	Pengadaan peralatan gedung kantor	38.000.000	25.000.000	-	-	-
<b>TOTAL</b>			<b>84.000.000</b>	<b>60.000.000</b>	-	-	-	-
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	27.000.000	-	-	-	-
		<b>TOTAL</b>			<b>27.000.000</b>	-	-	-
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	-	15.000.000	16.516.300	17.516.300
		<b>TOTAL</b>			-	-	<b>15.000.000</b>	<b>16.516.300</b>
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Keuangan	-	-	10.000.000	-	-
		<b>TOTAL</b>			-	-	<b>10.000.000</b>	-
6	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	1	Peningkatan Kegiatan, Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	92.000.000	-	-	-	-
		<b>TOTAL</b>			-	-	<b>10.000.000</b>	-

		2	Monitoring Pelaksanaan Investasi dan Penanaman Modal	-	30.000.000	-	-	-	-
		<b>TOTAL</b>		<b>92.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	-	-	-	-
<b>7</b>	<b>Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</b>	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Industri	125.750.000	-	-	-	-	-
		2	Pemberian Kemudahan Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah	-	-	-	28.500.400	29.500.000	30.500.000
		<b>TOTAL</b>		<b>125.750.000</b>	-	-	<b>28.500.400</b>	<b>29.500.000</b>	<b>30.500.000</b>
<b>8</b>	<b>Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM</b>	1	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD	102.300.000	-	-	-	-	-
		<b>TOTAL</b>		<b>102.300.000</b>	-	-	-	-	-
<b>9</b>	<b>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil</b>	1	Pendidikan dan Pelatihan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Organisasi dan Badan Hukum Koperasi	57.700.000	-	-	-	-	-
		2	Pengembangan Kewirausahaan Kompetitif UKM	84.200.000	-	-	-	-	-
		<b>TOTAL</b>		<b>141.900.000</b>	-	-	-	-	-
<b>10</b>	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor</b>	1	Sinkronisasi dan Pemantauan Dunia Usaha	77.000.000	25.000.000	-	-	-	-
		<b>TOTAL</b>		<b>77.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	-	-	-	-

<b>11</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</b>	1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	82.000.000	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>				<b>82.000.000</b>	-	-	-	-	-
<b>12</b>	<b>Program Peningkatan Pengendalian Inflasi</b>	1	Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah	76.950.000	40.000.000	102.600.000	44.142.300	54.144.500	64.155.500
		2	Peningkatan Pengawasan dan Pemantauan Sembilan Bahan Pokok	113.500.000	25.000.000	30.000.000	31.020.600	31.040.000	32.080.000
<b>TOTAL</b>				<b>190.450.000</b>	<b>65.000.000</b>	<b>132.600.000</b>	<b>75.162.900</b>	<b>85.184.500</b>	<b>96.235.500</b>
<b>13</b>	<b>Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif</b>	1	Perencanaan, Koordinasi, dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah	-	-	173.100.000	46.799.800	56.799.000	66.799.500
<b>TOTAL</b>				-	-	<b>173.100.000</b>	<b>46.799.800</b>	<b>56.799.000</b>	<b>66.799.500</b>
<b>14</b>	<b>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</b>	1	Pengendalian dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam	100.000.000	-	-	-	-	-
		2	Koordinasi Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam	150.000.000	-	-	-	-	-
		3	Penyusunan Profil Menuju Indonesia Hijau	96.877.500	-	-	-	-	-
		4	Pemantauan Limbah Perusahaan	-	71.000.000	-	39.596.800	49.600.000	50.000.000
		5	Pemantauan Kualitas Air Terbentuk Tersedia dan Beroperasi Pada DAS prioritas Secara Kontinyu	-	70.000.000	-	42.724.200	44.725.000	48.500.000

		6	Pemantauan dan Pengendalian Limbar, Kualitas Air dan Udara	-	-	179.000.000	-	-	-
<b>TOTAL</b>				<b>346.877.500</b>	<b>141.000.000</b>	<b>179.000.000</b>	<b>82.321.000</b>	<b>94.325.000</b>	<b>98.500.000</b>
<b>15</b>	<b>Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam</b>	1	Perencanaan dan Penyusunan Program Pembangunan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	109.100.000	30.000.000	-	41.601.200	51.500.000	55.540.000
<b>TOTAL</b>				<b>109.100.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>-</b>	<b>41.601.200</b>	<b>51.500.000</b>	<b>55.540.000</b>
<b>16</b>	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>	1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	-	-	-	30.019.800	30.120.000	31.020.000
<b>TOTAL</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30.019.800</b>	<b>30.120.000</b>	<b>31.020.000</b>
<b>17</b>	<b>Program Koordinasi Pembinaan Sumber Daya Alam</b>	1	Sosialisasi Pembinaan Pertanian SDA	97.600.000	50.000.000	-	-	-	-
		2	Koordinasi dan Monitoring Evaluasi Pertanian SDA	100.000.000	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>				<b>197.600.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>18</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan</b>	1	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pertambangan	-	-	35.700.000	-	-	-
<b>TOTAL</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35.700.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

19	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri	-	-		15.860.600	16.960.500	17.150.000
		2	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	-	-	64.000.000	12.051.800	13.050.000	14.100.000
<b>TOTAL</b>				-	-	<b>64.000.000</b>	<b>27.912.400</b>	<b>30.010.500</b>	<b>31.250.000</b>
<b>Total Pendanaan Indikatif / Tahun</b>				<b>1.905.977.500</b>	<b>801.820.000</b>	<b>862.782.000</b>	<b>602.625.500</b>	<b>659.747.000</b>	<b>703.153.000</b>

**INDIKATOR KINERJA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM  
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

**SKPD : BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target						Kondisi Akhir
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Memperkuat efektifitas kebijakan perekonomian daerah	<i>Meningkatnya Perusahaan yang mengikuti Perda tentang CSR</i>	<i>Adanya rumusan kebijakan yang menunjang berkembang perekonomian daerah</i>	10	20	50	65	75	80	100	
2	Memperkuat Pembinaan terhadap BUMDes dan UKM	<i>Meningkatnya keahlian pengrajin Tenun Bumpak di Kel. Masmambang dan Desa Kampai</i>	Pelatihan Tenun Bumpak	-	-	40	45	50	60	60	
3	Terlaksananya Kegiatan TPID	<i>Pasar rakyat, pasar modern dan TPID</i>	Stabilitas harga bahan pokok	10	20	50	60	80	100	100	
			Tidak terjadinya lonjakan harga	10	20	50	65	75	80	100	

4	Terwujudnya Pembinaan dan pengawasan Pemantauan Limbah, Kualitas Air dan Udara	<i>Jumlah Perusahaan yang telah melakukan uji limbah</i>	Perusahaan Perkebunan Sawit dan Karet yang ada dalam wilayah Kabupaten Seluma melaksanakan tata kelola Limbah, Kualitas Air dan Udara dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku	10	20	50	65	75	80	100
5	Terwujudnya Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Energi	<i>Jumlah perusahaan pertambangan</i>	Sumber Daya Alam dan Energi Sumber Daya Mineral yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat	20	25	35	75	80	100	100
	Sumber Daya Mineral		Sumber Daya Alam dan Energi Sumber Daya Mineral dapat meningkatkan PAD bagi Kabupaten Seluma dan dapat menjadi ajang memperkenalkan daerah	20	25	35	75	80	100	100

Tabel 4.1

## Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Sasaran Pada tahun Ke				
				2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Memperkuat efektifitas kebijakan perekonomian daerah	<i>Meningkatnya Perusahaan yang mengikuti Perda tentang CSR</i>	<i>Adanya rumusan kebijakan yang menunjang berkembang perekonomian daerah</i>	4 Laporan	4 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	6 Laporan
2.	Memperkuat Pembinaan terhadap BUMDes dan UKM	<i>Meningkatnya keahlian pengrajin Tenun Bumpak di Kel. Masmambang dan Desa Kampai</i>	Pelatihan Tenun Bumpak	-	1 UKM	1 UKM	2 UKM	2 UKM
3.	Terlaksananya Kegiatan TPID	<i>Pasar rakyat, pasar modern dan TPID</i>	Stabilitas harga bahan pokok	4 Dokumen	4 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen
			Tidak terjadinya lonjakan harga	20	50	60	75	80
4.	Terwujudnya Pembinaan dan pengawasan Pemantauan Limbah, Kualitas Air dan Udara	<i>Jumlah Perusahaan yang telah melakukan uji limbah</i>	Perusahaan Perkebunan Sawit dan Karet yang ada dalam wilayah Kabupaten Seluma melaksanakan tata kelola Limbah, Kualitas Air dan Udara dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku	3 SHU	3 SHU	4 SHU	4 SHU	5 SHU

5.	Terwujudnya Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Energi Sumber Daya Mineral	<i>Jumlah perusahaan pertambangan</i>	Sumber Daya Alam dan Energi Sumber Daya Mineral yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat	2	2	3	3	4
			Sumber Daya Alam dan Energi Sumber Daya Mineral dapat meningkatkan PAD bagi Kabupaten Seluma dan dapat menjadi ajang memperkenalkan daerah	2	2	3	3	4



**Mengetahui**  
**Kepala Bagian Adm. Perekonomian SDA,**

**ZURAINI, SP, M.Si**  
**NIP. 19730301 200604 2 002**